



LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

**MITIGASI ANCAMAN BENCANA LONGSOR MELALUI SOSIALISASI DAN
SIMULASI KEPADA SISWA-SISWI SMPN 3 MALANGBONG DI DESA
CILAMPUYANG, KECAMATAN MALANGBONG, KABUPATEN GARUT**

PROFIL ANALIS PENANGGULANGAN BENCANA

PEMBIMBING:

Dr. Helly Ocktilia, M.P

Oleh:

RANA FAIRUS AMNA

NRP. 20.03.065

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Mitigasi Ancaman Bencana Longsor Melalui Sosialisasi dan Simulasi Kepada Siswa-Siswi SMPN 3 Malangbong, di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut

Nama Mahasiswa : Rana Fairus Amna

NRP : 20.03.065

Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan

Pembimbing



Dr. Helly Ocktilia, M.P

Mengetahui:

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial

Lina Favourita Sutiaputri, Ph. D

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Karunia Nya sehingga laporan akhir praktikum komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dapat diselesaikan tepat waktu. Penulisan laporan akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat pelaksanaan praktikum institusi. Selain itu laporan akhir diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti dalam memberikan wawasan baru terutama dalam hal perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Dalam menyelesaikan laporan akhir praktikan menemui beberapa hambatan dalam berbagai hal, namun dengan bantuan dari berbagai pihak laporan ini dapat diselesaikandenga baik. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan sebesar besarnya kepada :

1. Suharma, S.Sos, MP., Ph.D selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
2. Lina Favourita, Sutiaputri Ph.D, selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
3. Dra. Atirista Nainggolan, M.P. selaku kepala laboratorium Progam Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
4. Dr. Helly Ocktilia, M.P. selaku dosen pembimbing yang telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan sabar dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan motivasi kepada praktikan dari awal hingga selesainya praktikum.
5. Agus Samsudi selaku Kepala Desa Cilampuyang dan seluruh perangkat Desa Cilampuyang
6. Suruh Ketua RT dan RW di wilayah Desa Cilampuyang
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dan jajarannya

8. Anggota kelompok 7 praktikum Institusi Dinas Sosial Kabupaten Subang yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan proses praktikum.
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian laporan akhir.

Demikian laporan ini disusun, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 10 November 2023

Rana Fairus Amna

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum	3
1.3 Manfaat Praktikum	3
1.4 Fokus Praktikum	4
1.5 Waktu dan Lokasi Praktikum	5
1.6 Sistem Praktikum	6
1.7 Metode, Strategi dan Teknologi Praktik Pekerja Sosial yang Digunakan	6
1.8 Teknologi Intervensi Pekerja Sosial dengan Komunitas	8
1.9 Peran Pekerja Sosial	9
1.10 Proses Supervisi	10
1.11. Tahapan Praktikum	12
1.12 Sistematika Penulisan Laporan Praktikum.....	16
BAB II TINJAUAN KONSEP	17
2.1 Kajian Tentang Komunitas	17
2.2 Kajian Tentang Sistem Pemerintah Lokal.....	21
2.3 Kajian Tentang Kebencanaan	24
BAB III PROFIL DESA	31
3.1 Latar Belakang	31
3.2 Komponen Khusus Dalam Masyarakat.....	33
3.3. kehidupan Interaksi Sosial Masyarakat	41
3.4 Identifikasi Potensi dan Sumber	42
3.5 Masalah Sosial Utama yang Tampak	44
BAB VI PELAKSANAAN PRAKTIKUM	49
4.1 Inisiasi Sosial	49
4.2 Pengorganisasian Sosial	52
4.3 Asesmen	53

4.4 Perumusan Rencana Intervensi (Perencanaan Sosial)	61
4.5 Pelaksanaan Intervensi	69
4.6 Evaluasi	71
4.7 Terminasi dan Rujukan	72
BAB V REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM	75
5.1 Penilaian Pelaksanaan Praktikum	75
5.2 Usulan dan Masukan Praktikan Pekerja Sosial Makro.....	76
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	77
6.1 Kesimpulan	77
6.2 Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined. 79
LAMPIRAN	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Supervisi Pra Lapangan ke-1	10
Gambar 1.2 Supervisi Pra Lapangan ke-2	11
Gambar 1.4 Penerimaan Mahasiswa Praktikan oleh Bupati Kabupaten Garut...	13
Gambar 1.5 Penerimaan oleh Kepala Desa Cilampuyang	14
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	37
Gambar 4.1 Analisis Pohon Masalah	57
Gambar 4.2 Diagram Venn	58
Gambar : 4.3 Pohon Masalah	58
Gambar 4.4 Diagram Venn	60
Gambar 4.6 Pelaksanaan Intervensi	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembagian Dusun 1,2,3.....	32
Tabel 3.2 kondisi geografis	32
Tabel 3. 4 Gambaran Umum Kondisi penduduk	34
Tabel 3.5 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Desa Cilampuyang.....	42
Tabel 3.6 Sumber Komunitas di Desa Cilampuyang	43
Tabel 3.7 Hasil Identifikasi Masalah.....	44
Tabel 4.1 Permasalahan Sosial Desa Cilampuyang	54
Tabel 4.2 Potensi Sumber Desa Cilampuyang.....	55
Tabel 4.2 wilayah terjadinya Tanah Longsor	62
Tabel 4.2 Sistem Partisipan	64
Tabel 4.3 Jadwal Pelaksanaan	66
Tabel 4.4 Rencana Anggaran Biaya	66
Tabel 4. 5 Analisis SWOT	68
Tabel 4.6 Proses Pelaksanaan Intervensi	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi sosial serta mencegah dari disfungsi sosial. Dalam melaksanakan pelayanannya, pekerja sosial didasari tiga kerangka yaitu kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keterampilan (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of value*). Pekerja sosial juga senantiasa memegang motto "*to help people to help themselves*" yang menjelaskan bahwa pekerja sosial membantu masyarakat agar mereka mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan kemampuan yang mereka miliki.

Proses pendidikan pekerjaan sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, dilakukan tidak hanya melalui pembelajaran di dalam kelas (*classroom teaching*) tetapi juga di lapangan (*field teaching*) melalui kegiatan praktikum. Praktikum menjadikan mahasiswa pekerjaan sosial tidak hanya mampu memahami kenyataan yang ada di lingkungannya tetapi akan memiliki sikap tanggap (*responsive*) dan keterampilan kerja (*work skill*) yang memadai.

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Poltekesos Bandung didirikan dengan tujuan untuk memenuhi, menyediakan, dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesejahteraan sosial yang mempunyai keahlian sebagai analisis jaminan sosial, analisis sumber dana bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial, dan analisis penanggulangan bencana. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka salah satu muatan kurikulum Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial adalah menyelenggarakan kegiatan praktikum sebagai karakteristik unggul program studi ini.

Praktikum mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial dilaksanakan 3 (tiga) kali secara bertahap mulai dari Praktikum Laboratorium yang dilaksanakan untuk membangun kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan mahasiswa

dalam mempraktikkan kelima profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial; kemudian Praktikum Institusi untuk membangun kompetensi praktik berbasis lembaga; selanjutnya Praktikum Komunitas untuk membangun kompetensi praktik pekerjaan sosial makro melalui intervensi komunitas

Praktikum komunitas, sebagai bagian ketiga dari beberapa proses praktikum yang dilaksanakan di Poltekesos Bandung yang harus diikuti oleh mahasiswa, dalam praktikum komunitas ini berfokus pada intervensi pekerja sosial di komunitas yang berada di suatu Desa yang telah dipilih oleh pihak lembaga. Desa merupakan tingkat pemerintah terkecil di Indonesia yang memiliki otonomi dalam dua sistem pemerintah. Kegiatan ini menjadi bagian integral dari kurikulum wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa program studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan pada semester VII. Praktikum ini bertujuan sebagai *platform* pembelajaran di mana mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang telah mereka peroleh dari berbagai mata kuliah dalam konteks praktik pekerjaan sosial komunitas.

Pelaksanaan praktikum komunitas dilaksanakan di Kabupaten Garut praktikan berketepatan praktikum di Desa Cilampuyang. Pelaksanaan praktikum komunitas ini dilakukan selama 40 hari dalam pelaksanaannya praktikan di Desa Cilampuyang mengambil salah satu isu permasalahan sosial. Fokus permasalahan sosial yang diambil praktikan terkait profil penanggulangan bencana. Gambaran umum Desa Cilampuyang berada di daerah dataran tinggi dan berbukit-bukit dimana potensi bencana yang ada adalah tanah longsor. Beberapa titik rawan bencana tanah longsor di Desa Cilampuyang yaitu di wilayah lahan pertanian warga, di Kampung Cibitung, Cigorowong, dan SMPN 3 Malangbong. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait potensi-potensi bencana dan belum adanya sosialisasi terkait mitigasi kebencanaan di Desa dapat menyebabkan ketika terjadi longsor warga tidak memiliki persiapan dan dapat menyebabkan tingginya tingkat kerugian yang dialami oleh warga. Maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan ini, praktikan membuat sebuah program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi bencana. Dalam rencana intervensi ini yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program adalah siswa-siswi SMPN 3 Malangbong.

1.2 Tujuan Praktikum

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum praktikum komunitas adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial di komunitas sesuai profil lulusan.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus praktikum komunitas adalah agar mahasiswa memiliki:

1. Kemampuan untuk menerapkan konsep dan teori-teori praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial di komunitas.
2. Kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan komunitas;
3. Kemampuan berkomunikasi dan mengembangkan relasi pertolongan praktik pekerjaan sosial dengan target group dan interest group;
4. Kemampuan melakukan inisiasi sosial dengan melibatkan masyarakat di dalam memahami profil masyarakat;
5. Kemampuan melakukan asesmen untuk menemukenali dan menganalisis permasalahan, kebutuhan, potensi dan sumber, serta kebijakan sosial yang relevan.
6. Kemampuan merumuskan perencanaan intervensi untuk pengembangan komunitas/ masyarakat lokal secara partisipatif;
7. Kemampuan menerapkan rencana intervensi.
8. Kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil intervensi.
9. Kemampuan melakukan terminasi dan rujukan dalam pengembangan komunitas/masyarakat lokal.
10. Kemampuan melakukan pencatatan dan pelaporan dalam pengembangan
11. Komunitas/ masyarakat lokal.

1.3 Manfaat Praktikum

1.3.1 Manfaat praktikum komunitas bagi:

1. Mahasiswa Manfaat praktikum komunitas bagi mahasiswa antara lain:
 - 1) Mahasiswa memiliki pengalaman praktik intervensi pekerjaan sosial komunitas untuk merintis pengembangan karier professional sebagai pekerja sosial.

- 2) Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas.
 - 3) Mahasiswa lebih memahami dan peka terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan kesejahteraan komunitas.
2. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Manfaat praktikum komunitas bagi Poltekesos antara lain:
- 1) Meningkatnya kualitas kurikulum Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Poltekesos Bandung.
 - 2) Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerjaan Sosial dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.
 - 3) Memperoleh kesempatan untuk mempromosikan profesi dan pendidikan pekerjaan sosial
3. Masyarakat dan Pemerintah Lokal Manfaat praktikum komunitas bagi masyarakat dan pemerintah lokal antara lain:
- 1) Meningkatnya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.
 - 2) Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada.
 - 3) Mendapat masukan tentang peluang-peluang pemanfaatan sistem sumber penyedia pelayanan yang dapat diakses untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 - 4) Mendapat masukan tentang peluang-peluang pengembangan kebijakan di tingkat lokal.

1.4 Fokus Praktikum

Fokus praktikum komunitas adalah praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas. Praktikan dapat memfokuskan diri pada salah satu profil lulusan yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Penerima manfaat dari berbagai kegiatan praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas dapat difokuskan pada komunitas atau populasi masyarakat tertentu sesuai dengan profil lulusan yang dipilih, untuk

tujuan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan sosial tertentu.

1.5 Waktu dan Lokasi Praktikum

1.5.1 Waktu Praktikum

Pelaksanaan praktikum komunitas diselenggarakan pada semester VII, dengan tiga proses dibawah ini:

1. Pra Lapangan

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Pembekalan | : 25-27 Oktober 2023 |
| 2) Bimbingan pra lapangan | : 25 dan 27 Oktober 2023 |
| 3) <i>Review</i> literatur | : 25-30 Oktober 2023 |
| 4) <i>Team building</i> | : 30 Oktober 2023 |
| 5) Penyusunan RKL praktikum | : 26-30 Oktober 2023 |

2. Lapangan

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Pelepasan oleh direktur | : 27 Oktober 2023 |
| 2) Penerimaan praktikan | : 31 Oktober 2023 |
| 3) Supervisi | : 31 Oktober-08 Desember 2023 |
| 4) Lokakarya | : 08 Desember 2023 |
| 5) Pengakhiran praktikum | : 09 Desember 2023 |

3. Pasca Lapangan

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Bimbingan penulisan | : 10-14 Desember 2023 |
| 2) Pendaftaran ujian lisan | : 15 Desember 2023 |
| 3) Ujian lisan | : 18-19 Desember 2023 |
| 4) Perbaikan laporan | : 18-26 Desember 2023 |
| 5) Uji kompetensi | : 27-28 Desember 2023 |

1.5.2 Lokasi Praktikum

Praktikum komunitas dilakukan dalam masyarakat di tingkat lokal yang menurut administrasi pemerintahan pada tingkat pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi yakni desa, lokasi praktikum komunitas telah ditetapkan oleh Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu berada di 14 desa di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut yaitu Desa Sukarasa, Sukratu,

Sukamanah, Cisit, Malangbong, Cihaurkuning, Cilampuyang, Sekarwangi, Cinagara, Cikarag, Bunisari, Mekarmulya, Citeras, dan Campaka. Praktikan berpraktik di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat

1.6 Sistem Praktikum

Kegiatan praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Poltekesos Bandung, diselenggarakan dengan menggunakan sistem *block placement* dimana praktikan menetap di lokasi praktik. Pembelajaran praktik di desa dilaksanakan selama 40 hari atau setara dengan 238 jam yang dilaksanakan setiap hari (senin-minggu) atau sekitar 5.95 jam sehari atau sesuai dengan waktu yang diminta oleh masyarakat. Praktikum komunitas dilakukan secara berkelompok. Penentuan kelompok ditetapkan oleh Prodi Lindayasos dengan jumlah anggota yaitu 6-7 orang per

1.7 Metode, Strategi dan Teknologi Praktik Pekerja Sosial yang Digunakan

1.7.1 Metode Pekerja Sosial Makro

Metode yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial pada pengembangan komunitas/masyarakat dilakukan dengan metode pekerjaan sosial yang meliputi Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) dan Pengembangan Organisasi (*Community Organization*) atau yang disebut dengan *Community Work*. Dalam pelaksanaan praktikum metode yang digunakan oleh praktikan menggunakan salah satu pendekatan, yakni pengembangan lokal atau komunitas (*Locality Development/Community Development*) dengan menekankan partisipasi aktif dari masyarakat atau kelompok sasaran. Pengembangan masyarakat lokal adalah proses tindakan kolektif untuk mencapai keadilan sosial dan perubahan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan mengambil tindakan untuk memenuhinya. Hal ini didasarkan pada seperangkat nilai yang disepakati dan khususnya sangat penting bagi kelompok rentan dan masyarakat yang tidak beruntung).

(*Locality Development/Community Development*) merupakan metode yang diterapkan pada masyarakat yang mengalami anomie dan kemurungan sosial, didalamnya terdapat kesenjangan relasi dan kapasitas dalam memecahkan

masalah secara demokratis dan komunitas tradisional yang statis. Tujuan utama model ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat. Metode ini difokuskan kepada seluruh atau sebagian warga masyarakat, dengan asumsi dasar bahwa semua warga masyarakat mempunyai kepentingan yang sama. Dengan mereka saling memahami adanya kepentingan yang sama, maka mereka akan bekerja sama untuk mencapai konsensus mengenai langkahlangkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Kegiatan pekerja sosial dalam penerapan model ini adalah memaksimalkan partisipasi warga masyarakat dalam penyusunan suatu rencana pembangunan yang rasional, termasuk pemecahan masalah. Dalam hal ini pekerjaan sosial berperan sebagai katalisator guna berlangsungnya perubahan dan membimbing setiap kelompok untuk mencapai tujuan

1.7.2 Strategi dan Teknik Pekerja Sosial

Strategi dan taktik dalam intervensi komunitas menurut Netting (2004) dibagi menjadi tiga, yaitu kerjasama (*collaboration*), kampanye sosial (*sosial campaign*), dan kontes (*contest*). Setiap strategi tersebut memiliki taktik-taktik tersendiri. Berikut merupakan penjelasannya:

1. Kolaborasi (*Collaboration*)

Collaboration yaitu strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan jika kelompok sasaran/ komunitas sudah memahami apa yang akan dan harus dilakukan. Selain itu, komunitas sasaran sudah memiliki kehendak atau kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Taktik yang digunakan yaitu implementasi dan *capacity building*. Implementasi yaitu dengan adanya kerjasama yang erat, dengan demikian rencana perubahan dapat diimplementasikan. *Capacity building* yaitu pengembangan kemampuan, taktik ini terdiri dari dua taktik lagi yaitu perluasan partisipasi dan pemberdayaan kelompokkelompok lemah.

2. Kampanye (*Campaign*)

Kampanye sosial adalah suatu upaya untuk mempengaruhi anggota sistem sasaran agar sistem tersebut menyadari bahwa perubahan memang benar-benar dibutuhkan dan dengan demikian sumber yang dibutuhkan dapat dialokasikan. Taktik yang digunakan yaitu pendidikan atau penyuluhan, persuasi, dan pemanfaatan media masa. Pendidikan atau penyuluhan adalah

taktik yang digunakan untuk tujuan memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran agar mereka mampu menerima apa yang akan dilakukan dan bersedia terlibat secara aktif. Persuasi adalah taktik untuk membujuk atau memberikan gambaran bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Pemanfaatan media masa yaitu taktik untuk membujuk atau mengubah persepsi kelompok sasaran dengan memanfaatkan media masa yang ada atau media yang mudah diakses oleh kelompok sasaran.

3. Kontes (*Contest*)

Kontes adalah strategi yang dapat dilakukan jika kelompok sasaran mengalami permasalahan yang lebih banyak disebabkan oleh struktur kekuasaan yang menindas, tidak adil, dan merugikan kelompok terbesar dalam masyarakat. Taktik yang digunakan yaitu advokasi serta tawar menawar dan negosiasi. Advokasi adalah taktik yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memperjuangkan kepentingan kelompok sasaran dengan cara menawarkan suatu persyaratan tertentu kepada pihak lain (kelompok dominan, pemerintah daerah, legislatif, atau kelompok lain yang menindas) sebagai pengganti kerugian yang dialami atas dilaksanakannya suatu program tertentu.

1.8 Teknologi Intervensi Pekerja Sosial dengan Komunitas

Teknologi yang digunakan dalam setiap tahapan praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas termasuk kebijakan desa setempat, hendaknya mengutamakan teknik partisipatif, kecuali dalam asesmen dapat dipadukan dengan non-partisipatif untuk memperoleh informasi yang lengkap dan terpercaya. Teknologi yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan tahapan praktik yang dilakukan, karakteristik mitra kerja dan situasi sosial dalam lingkungan praktik yang dihadapi dengan merujuk pada berbagai referensi praktik pekerjaan sosial.

1. Teknik inisiasi sosial antara lain dengan *Community Involvement (CI)*, percakapan sosial, *home visit*, dan pertemuan warga.
2. Pengorganisasian hendaknya mendayagunakan dan menguatkan struktur pengorganisasian masyarakat dan pemimpin lokal yang ada yang memiliki peran relevan atau *power* dalam pengembangan masyarakat untuk mencegah

maupun mengatasi permasalahan sosial dari populasi target yang disepakati menjadi fokus praktik.

3. Teknik asesmen antara lain dengan teknik-teknik dari metode asesmen partisipatif dalam *Participatory Rural Appraisal (PRA)* seperti transect walk dan pemetaan (wilayah, masalah dan sumber), penelusuran sejarah, diskusi klasifikasi kesejahteraan, diskusi terfokus dalam media *Community/Night Meeting Forum (CMF)*, diagram venn jaringan organisasi; dan teknik-teknik asesmen non-partisipatif seperti mini survey (antara lain *Neighborhood Survey Study*), wawancara (termasuk *The Sustainable Livelihoods Interview*), dan studi dokumentasi.
4. Teknik-teknik perencanaan partisipatif antara lain dengan diskusi perencanaan tindakan yang diambil dari *Technology of Participation (ToP)*.
5. Teknik intervensi dipilih disesuaikan dengan hasil asesmen dan pilihan strategi dan taktik (kolaborasi, kampanye, atau kontes) yang disesuaikan dengan kondisi kesiapan masyarakat untuk melakukan perubahan.
6. Teknik evaluasi dalam pengembangan masyarakat hendaknya menggunakan evaluasi partisipatif seperti dengan diskusi terfokus. Disamping itu, dapat dilengkapi dengan teknik wawancara mendalam atau pengungkapan pengalaman perubahan.

1.9 Peran Pekerja Sosial

Ami Maryami dkk 2021 beberapa peran pekerja sosial sebagai berikut :

1. Peran Pekerja Sosial sebagai Pemungkin (*Enabler*)
Peran pekerja sosial pemungkin (*Enabler*) merupakan peranan sebagai pendorong, pembimbing, penuntun atau penyedia fasilitas sehingga pekerja sosial diharapkan membantu dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.
2. Peran Pekerja Sosial sebagai Perantara (*Broker*)
Peran pekerja sosial sebagai perantara (broker) merupakan perantara dalam masyarakat yang menghubungkan individu dengan kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan baik individu, kelompok, atau komunitas.
3. Peran Pekerja Sosial sebagai Pendidik (*Educator*)

Peran pekerja sosial sebagai pendidik (*edukator*) diharapkan pekerja sosial mampu berbicara didepan public untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan potensi-potensi bencana yang ada di wilayah Desa Cilampuyang.

1.10 Proses Supervisi

Supervisi dilaksanakan oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Dra.Helly Ocktilia, M.P selaku dosen pembimbing kepada praktikan. Supervisi dimulai pada saat pra lapangan, lapangan hingga pasca lapangan yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan dukungan kepada praktikan dalam pelaksanaan praktikum komunitas. Berikut merupakan proses supervisi :

1.10.1 Bimbingan Pra Lapangan

1. Bimbingan Pra-Lapangan ke-1

Supervisi pertama dilakukan secara luring pada tanggal 24 Oktober 2023, pada pukul 11.00 wib di ruang dosen lantai dua. Supervisi atau bimbingan pertama ini dosen pembimbing memperkenalkan diri dan menjelaskan teknik praktikum komunitas yang digunakan dan penugasan paper terkait model pengembangan masyarakat, teori intervensi komunitas, Teknologi dalam pelaksanaan rencana intervensi dan profil desa Cilampuyang.



Gambar 1.1 Bimbingan Pra Lapangan ke-1

2. Bimbingan Pra Lapangan Ke-2

Supervisi ke-2 dilaksanakan pada 27 Oktober 2023 dihadiri oleh seluruh anggota kelompok tujuh. Dosen pembimbing yaitu ibu Helly Ocktilia, M.D mengarahkan praktikan untuk memahami pedoman yang telah disampaikan pada saat pembekalan praktikum komunitas yang disampaikan oleh tim dosen Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dan mengarahkan praktikan untuk mencari tempat tinggal selama praktikum yang layak bisa dipakai serta nyaman.



Gambar 1.2 Bimbingan Pra Lapangan ke-2

1.10.2 Supervisi Lapangan

1. Supervisi Lapangan ke-1

Supervisi lapangan dilaksanakan pada 31 Oktober 2023, dosen pembimbing mengarahkan praktikan untuk mengisi catatan harian pelaksanaan praktikum komunitas sesuai dengan pedoman. Praktikan juga dapat menyusun profil wilayah atau lokasi praktikum dengan memperhatikan informasi terkait wilayah, isu-isu permasalahan, potensi dan sistem sumber yang terdapat di wilayah praktik. Kemudian membahas terkait tahap asesmen yang akan dilakukan setiap praktikan dengan isu masalah masing – masing yang sudah diidentifikasi serta fokus masalah.

2. Supervise lapangan ke-2

Supervise lapangan ke-2 dilaksanakan pada 12 November 2023 pada pukul 13.00 yang dilaksanakan di Kantor Desa Cilampuyang. Dalam supervise lapangan ke-2 ini membahas proses inisiasi sosial dan hasil inisiasi sosial yang telah dilakukan oleh praktikan, selain menanyakan proses dan hasil dari inisiasi sosial yang dilakukan, dosen pembimbing juga menanyakan terkait pengorganisasian sosial. Dalam supervise ini dosen pembimbing juga menanyakan isu-isu yang akan diangkat oleh setiap praktikan dan hasil asesmen awal yang telah dilaksanakan menggunakan Methodology Participatory Assessment.

3. Supervise lapangan ke-3

Supervise lapangan ke-3 dilaksanakan pada 24 November 2023 pada pukul 15.30 WIB yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Cilampuyang. Dalam supervise ini membahas terkait hasil asesmen dan perumusan rencana intervensi dari setiap praktikan dan dosen pembimbing juga meminta

mengirimkan rencana intervensi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan intervensi dilakukan.

1.11. Tahapan Praktikum

Praktikum dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pra lapangan, lapangan dan pasca lapangan. Berikut merupakan langkah-langkah praktikum komunitas :

1.11.1 Tahap Pra Lapangan

1. Pembekalan Pertama

Tahap pra lapangan dilaksanakan pada hari selasa , 24 Oktober 2023. Pada pembekalan pertama ini membahas terkait teknik pelaksanaan praktikum lapangan mulai dari penerimaan yang akan dilakukan oleh Bupati Kabupaten garut sampai penerimaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dimana praktikan ditempatkan. Selain itu pada pembekalan pertama ini juga membahas tugas tambahan yang akan dilakukan oleh praktikan terkait asesmen penerima bantuan warimindo.

2. Pembekalan Kedua

Pembekalan kedua ini dilakukan pada hari rabu, 25 Oktober 2023 yang disampaikan oleh Ibu Lina Favourita selaku Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Pada pembekalan ini menjelaskan terkait fokus praktikum komunitas dan proses praktikum komunitas yang dimulai dari inisiasi sosial, pegorganisasian sosial, asesmen, pelaksanaan rencana intervensi, dan terminasi, evaluasi, dan monitoring.

3. Pembekalan Ketiga

Pembekalan ketiga ini disampaikan oleh Drs. H. Aji Sukarmaji, M. Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut. Pada pembekalan ketiga ini membahas terkait permasalahan pokok dan tantangan pembangunan daerah Kabupaten Garut, tantangan pembangunan daerah, upaya penanganan kemiskinan ekstremitas, penanganan PPKS di Kabupaten Garut, Implementasi Program Penanggulangan Bencana, dan perlindungan sosial bagi korban bencana,

1.11.2 Tahap Lapangan

1. Penerimaan Praktikan di Pendopo Bupati

Kegiatan penerimaan praktikum komunitas dilakukan di pendopo bupati kabupaten Garut yang diterima langsung oleh bapak Bupati yaitu bapak

Rudy Gunawan. Seluruh praktikan menuju ke kabupaten garut untuk melaksanakan kegiatan penerimaan praktikum komunitas oleh bupati pada tanggal 31 Oktober 2023. Bupati Kabupaten Garut bapak Rudy Gunawan menerima dengan baik, beliau menceritakan sekilas tentang kabupaten Garut terkait permasalahan yang masi menjadi hal-hal yang harus di perhatikan oleh praktikan, selain itu bupati Garut juga menjelaskan terkait tantangan yang masih dihadapi oleh pemerintah garut, serta beliau juga berharap praktikan membawa perubahan baik untuk penuntasan masalah-masalah sosial yang ada di kabupaten Garut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di desa – desa praktikan di tempatkan



Gambar 1.4 Penerimaan Mahasiswa Praktikan oleh
Bupati Kabupaten Garut

2. Penerimaan Praktikan di Desa Cilampuyang

Setelah melakukan penerimaan di pendopo bupati praktikan langsung menuju ke ke Desa Cilampuyang. Praktikan diserahteri langsung oleh Bapak Kepala Desa yang berharap ketika adanya kegiatan praktikum komunitas di Kecamatan Malangbong membawa dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak kepala desa bapak Agus Samsudin praktikan dalam pelaksanaan praktikum komunitas.



Gambar 1.5 Penerimaan oleh
Kepala Desa Cilampuyang

3. Inisiasi Sosial

Praktikan melaksanakan inisiasi sosial kepada warga desa Cilampuyang hyang bertujuan untuk mendekatkan diri, membangun kepercayaan dan kerja sama melalui teknik *community involvement* yaitu membaaur dengan warga melalui kegiatan atau program yang ada di lingkungan desa Cilampuyang. Praktikan juga melakukan home visit kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkenalkan diri dan menciptakan kerja sama yang baik antar tokoh masyarakat dengan praktikan.

4. Pengorganisasian Sosial

Praktikan melaksanakan pengorganisian sosial bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai organisasi sosial yang ada di desa Cilampuyang melalui kegiatan rembug warga dan home visit. Pengorganisasian sosial dilaksanakan dengan melibatkan warga dan perwakilan organisasi setempat seperti Karang Taruna, posyandu, RT dan RW.

5. Asesmen

Asesemen dilaksanakan dalam dua sesi yaitu asesmen awal dan asesmen lanjutan. Praktikan melaksanakan asesmen awal menggunakan MPA (*Methode Partisipatory Asesmen*) untuk mengetahui permasalahan atau isu-isu yang ada dimasyarakat desa Cilampuyang. Asesmen awal bertempat di aula desa Cilampuyang. Asesmen lanjutan dilaksankan dengan tujuan untuk menggali atau mengetahui lebih dalam terkait isu yang telah ditemukan melalui FGD (*Focuss Group Disscusion*) dengan menggunakan teknologi Analis Pohon Masalah dan teknologi Diagram Ven

6. Menyusun Rencana Intervensi

Perumusan rencana intervensi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 21 November 2023. Perumusan rencana intervensi sebagai rencana tindakan lanjut dengan menggunakan *Technology Of Participation* (TOP). Perumusan rencana intervensi pada dasarnya merupakan perencanaan strategis yang mensyaratkan pengumpulan data dan informasi secara luas, eksplorasi alternative pemecahan masalah, serta implikasi depan atas keputusan yang dibuat.

7. Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rencana intervensi yang telah disusun. Pelaksanaan intervensi bertujuan mencapai perubahan penting bagi sebuah komunitas dengan adanya perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam pemecahan masalah. Kegiatan pelaksanaan intervensi dilaksanakan mulai dari tanggal 23 sampai 25 November 2023 yang berlokasi di Desa Cilampuyang.

8. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam pelaksanaan sebuah program yang dilaksanakan. kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah tujuan dari rencana intervensi tercapai atau tidak. Selain itu evaluasi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan intervensi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada tanggal 28-30 November 2023.

9. Terminasi

Terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat atau kelompok sasaran. Terminasi merupakan tahap akhir dari pelaksanaan program. Pada tahap ini praktikan mengucapkan terimakasih kepada masyarakat telah menerima praktikan dan bersedia membantu praktikan dalam pelaksanaan program. Terminasi dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023.

10. Rujukan

Rujukan adalah tindak lanjut dari proses pengakhiran yang membutuhkan keberlanjutan intervensi yang sudah dilaksanakan dengan menyalurkan kepada sistem sumber terkait untuk keberlangsungan program.

1.12 Sistematika Penulisan Laporan Praktikum

BAB I PENDAHULUAN	Memuat tentang latar belakang, tujuan praktikum, manfaat praktikum, fokus praktik, sasaran praktik, metode, strategi dan taktik praktik pekerjaan sosial yang digunakan, teknologi praktik pekerjaan sosial makro yang digunakan, peran pekerja sosial dalam praktikum, proses supervisi, langkah-langkah kegiatan praktikum, serta sistematika penulisan laporan praktikum.
BAB II KAJIAN PUSTAKA	Memuat tentang konsep masyarakat/komunitas, partisipasi masyarakat, keamanan lingkungan, sistem pemerintahan lokal, kebijakan dan program dalam pengembangan masyarakat dan kesejahteraan sosial dalam keamanan lingkungan, Praktik Pekerjaan Sosial Makro (definisi, model-model pengembangan masyarakat/ masyarakat, prinsip-prinsip, proses terbentuknya, strategi, taktik, dan teknik, dan peran pekerja sosial).
BAB III PROFIL KOMUNITAS	Memuat tentang latar belakang, komponen khusus dalam masyarakat, kehidupan interaksi sosial masyarakat, identifikasi potensi dan sumber serta masalah utama yang tampak.
BAB IV PELAKSAAN PRAKTIKUM	Memuat tentang tahapan praktikum yang dilakukan oleh praktikan mulai dari inisiasi sampai dengan evaluasi.
BAB V REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM	Memuat tentang refleksi lapangan.
BAB VI	Memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

TINJAUAN KONSEP

2.1 Kajian tentang Komunitas

2.1.1 Definisi Komunitas

Komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berarti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* berarti “sama, public, dibagi oleh semua atau banyak”. Menurut Soerjono Soekanto (2012:132), Istilah *Community* dapat diterjemahkan sebagai Masyarakat setempat yang menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota- anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat.

Edi Suharto (2005:123) membagi pengertian masyarakat menjadi 2 (dua) cakupan yaitu pengertian dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. “Pengertian masyarakat dalam arti yang sempit menunjukkan pada sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun tetangga. Sedangkan dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Pengertian dalam arti sempit itulah yang biasa disebut dengan komunitas”.

Dari kedua ahli yang memberikan pendapatnya dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah komunitas mencakup manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

2.1.2 Karakteristik Komunitas atau Masyarakat

Menurut Soejono Soekanto (2012), ciri-ciri dari masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Untuk menentukan identitasnya, menurut Soerjono Soekanto, buku Sosiologi: Suatu Pengantar (2003), masyarakat mempunyai ciri-ciri yang khas. Adapun daftar ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Hidup Berkelompok

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup sendiri. Ketidakmampuan itu mendorong manusia hidup berkelompok. Sebab, manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Konsep tersebut mengantarkan masing-masing individu hidup bermasyarakat.

2. Melahirkan Kebudayaan

Ketika manusia membentuk kelompok, mereka selalu berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan berupaya menyatukan pikiran dan pengalaman bersama agar terbentuk suatu rumusan yang dapat menjadi pedoman tingkah laku mereka, yakni kebudayaan. Selanjutnya, budaya itu dipelihara dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.

3. Mengalami Perubahan

Beragam latar belakang yang menyatukan tiap-tiap individu menjadi suatu masyarakat, membuat manusia mengalami perubahan. Perubahan ini dianggap sebagai upaya masyarakat menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Sebagai contoh, masyarakat beralih menggunakan surat elektronik untuk menggantikan surat kertas, ketika menerima pengaruh perkembangan teknologi.

4. Berinteraksi

Interaksi adalah hal yang mendasar dari terbentuknya masyarakat. Interaksi ditempuh untuk mencapai keinginan, baik pribadi maupun kolektif. Dengan berinteraksi, masyarakat membentuk suatu entitas sosial yang hidup.

5. Terdapat Kepemimpinan

Masyarakat cenderung mengikuti peraturan yang diberlakukan di wilayahnya. Contohnya, dalam lingkup keluarga, kepala keluarga mempunyai wewenang tertinggi untuk mengayomi keluarganya. Istri dan anak patuh kepada ayah atau suaminya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam masyarakat, ada peran pemimpin yang membantu menyatukan individu-individu.

6. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial menempatkan seseorang pada kedudukan dan perannya di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban masing-masing

individu atau kelompok menimbulkan adanya penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, stratifikasi sosial didasari atas kasta sosial, usia, suku, pendidikan, dan beberapa aspek lain yang memicu keberagaman.

2.1.3 Fungsi Komunitas atau Masyarakat

Fungsi komunitas/masyarakat dalam kehidupan manusia sangat penting. Terdapat lima fungsi masyarakat menurut Netting, Kettner dan McMurtry (2004:130- 131). Berikut adalah penjabaran dari lima fungsi tersebut:

1. Fungsi Produksi, Distribusi dan Konsumsi (*Production, Distribution, Consumption*). Kegiatan-kegiatan masyarakat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan sejenisnya.
2. Fungsi Sosialisasi (*Socialization*). Meneruskan atau mewariskan norma-norma, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang selama ini dianut oleh orang-orang yang berinteraksi di dalam masyarakat.
3. Fungsi Pengawasan Sosial (*Social Control*). Masyarakat senantiasa mengharapkan warganya untuk mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang dianut melalui penetapan hukum, peraturan dan sistem-sistem penegakkannya.
4. Fungsi Partisipasi Sosial (*Social Participation*). Masyarakat menyediakan wahana bagi para anggotanya untuk mengekspresikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingannya guna terbangunnya jaringan dukungan dan pertolongan melalui interaksi dengan warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi.
5. Fungsi Gotong Royong (*Mutual Support*). Keluarga-keluarga, teman-teman, para tetangga, kelompok sukarela dan asosiasi-asosiasi profesional yang tergabung dalam sebuah masyarakat biasanya saling membantu satu sama lain.

2.1.4 Bentuk Komunitas

Etienne Wager (2002; 24), komunitas mempunyai berbagai macam bentuk dan karakteristik, diantaranya :

1. Besar atau Kecil

Keanggotaan di beberapa komunitas ada yang hanya terdiri dari beberapa anggota saja dan ada yang mencapai 1000 anggota. Besar atau kecilnya anggota di suatu komunitas tidak menjadi masalah, meskipun demikian komunitas yang memiliki banyak anggota biasanya dibagi menjadi sub divisi berdasarkan wilayah sub tertentu.

2. Terpusat atau Tersebar

Sebagian besar suatu komunitas berawal dari sekelompok orang yang bekerja ditempat yang sama atau memiliki tempat tinggal yang berdekatan. Sesama anggota komunitas saling berinteraksi secara tetap serta ada beberapa komunitas yang tersebar diberbagai wilayah.

3. Berumur Panjang atau Berumur Pendek

Terkadang sebuah komunitas dalam perkembangannya, memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan jangka waktu keberadaan sebuah komunitas sangat beragam. Beberapa komunitas dapat bertahan dalam jangka tahunan, tetapi pula komunitas berumur pendek.

4. Internal atau Eksternal

Sebuah komunitas dapat bertahan sepenuhnya dalam unit bisnis atau bekerjasama dengan organisasi yang berbeda

5. Homogen atau Heterogen

Sebagian komunitas berasal dari latar belakang yang sama serta ada yang terdiri dari latar belakang yang berbeda. Pada umumnya jika sebuah komunitas berasal dari latar belakang yang sama komunikasi akan lebih mudah terjalin, sebaliknya jika komunitas terdiri dari berbagai macam latar belakang diperlukan rasa saling menghargai dan rasa toleransi yang cukup besar satu sama lain

6. Spontan atau Disengaja

Beberapa komunitas ada yang beriri tanpa adanya intervensi atau usaha pengembangan suatu organisasi. Anggota secara spontan bergabung karena kebutuhan berbagai informasi dan memiliki minat yang sama. Pada beberapa kasus, terdapat komunitas yang secara sengaja didirikan secara spontan atau disengaja tidak menentukan formal atau tidaknya sebuah komunitas.

7. Tidak Dikenal atau Dibawahi sebuah Institusi ‘

Sebuah komunitas memiliki berbagai macam hubungan dengan organisasi, baik itu komunitas yang tidak dikenali, maupun komunitas yang berdiri sendiri dibawah sebuah institusi.

2.2 Kajian tentang Sistem Pemerintah Lokal

2.2.1 Definisi Pemerintah Desa

Sugiman tahun 2018 pemerintah desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pada umumnya, sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

2.2.2 Bentuk Pemerintah Daerah

Pof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A menjelaskan terkait bentuk-bentuk pemerintah daerah dibagi menjadi 2 (dua) bentuk pemerintah daerah di dunia ini, yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*

1. *Local Self Government*

Pemerintah daerah dalam bentuk *Local Self Government* berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan negara.

Bentuk *Local Self Government* itu diperlukan untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak mungkin ditangani secara terpusat oleh pemerintah pusat. Penanganan urusan pemerintahan ini akan lebih baik jika ditangani oleh pemerintahan daerah tertentu (*Local Self Government*). Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, *Local Self Government* adalah pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Terdapat ciri-ciri tertentu *Local Self Government* atau pemerintahan daerah otonom, yaitu sebagai berikut.

- 1) Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah.
- 3) Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.

- 4) Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
- 5) Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

Local Self Government atau pemerintahan lokal daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi yang dapat mengurus rumah tangga sendiri. Hak otonom dalam *Local Self Government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara.

2. *Local State Government*

Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. *Local state government* atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk, dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi sosial merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan komunikasi fisik. Terdapat beberapa ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif, yaitu:

- 1) bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan;
- 2) pelimpahan kekuasaan ditujukan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
- 3) kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat;

- 4) pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri.

2.2.3 Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

2.3 Kajian tentang Kebencanaan

2.3.1 Manajemen Bencana

Definisi bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor 41 non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut *The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* atau IFRC, bencana adalah peristiwa yang secara tiba-tiba sangat mengganggu fungsi komunitas atau masyarakat dan menyebabkan kerugian manusia, material, dan ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat untuk mengatasi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Meski sering kali disebabkan oleh alam, bencana bisa berasal dari manusia. Bencana terjadi ketika bahaya berdampak pada orang-orang yang rentan.

WHO (2002) bencana adalah kejadian yang mengganggu kondisi normal keberadaan dan menyebabkan tingkat penderitaan itu melebihi kapasitas penyesuaian komunitas yang terkena dampak. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bencana adalah kejadian atau

rangkaian kejadian yang berlangsung mendadak yang mampu mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana dapat menyebabkan efek negatif pada ekonomi, lingkungan, material, dan psikologis korban yang mengalaminya. Bencana memiliki sumber atau penyebab, berdasarkan sumber atau penyebabnya, United Nations Development Programme (UNDP) mengelompokkan bencana atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

1. Bencana alam (natural disaster) antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
2. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan.
3. Bencana sosial antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi termasuk bencana akibat peperangan.

Faktor terjadinya bencana adalah adanya gabungan dari vulnerability dan hazard namun kapasitas masyarakat kurang untuk mempersiapkan bencana. Vulnerability adalah kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kecenderungan (susceptibility) sebuah komunitas terhadap dampak bahaya (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007).

2.3.2 Tahapan Manajemen Bencana

Tahap-tahap manajemen bencana adalah sebagai berikut:

1. Manajemen risiko bencana
Manajemen risiko bencana di dalamnya terdapat mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan. Manajemen risiko bencana biasanya dilakukan sebelum bencana terjadi.
 - 1) Pencegahan
Pencegahan adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman bencana melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 - 2) Mitigasi
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui penyadaran adanya bencana, peningkatan kemampuan

menghadapi bencana, dan pembangunan fisik. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, jenis-jenis kegiatan mitigasi bencana adalah penataan ruang, pengaturan pembangunan, tata bangunan, pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

3) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Contoh aktivitas kesiapsiagaan bencana adalah uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, penyiapan lokasi evaluasi, dan penyusunan data informasi mengenai tanggap darurat bencana. Tujuan kesiapsiagaan adalah mengurangi ancaman, mengurangi dampak bencana, dan menjalin kerja sama (IDEP, 2007).

4) Manajemen kedaruratan

Manajemen kedaruratan dilakukan saat bencana terjadi dan kegiatan dari manajemen kedaruratan adalah tanggap darurat. Tanggap darurat menurut UU No. 24 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

5) Manajemen pemulihan

Manajemen pemulihan dilakukan saat bencana telah usai dan di dalamnya terdapat pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi berbagai sektor.

(1) Pemulihan UU No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

- (2) Rehabilitasi Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. (UU No. 24 Tahun 2007).
- (3) Rekonstruksi Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam 46 segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca

Manajemen bencana penting bagi masyarakat untuk mengurangi ancaman-ancaman dan risiko bencana yang berujung pada berkurangnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Manajemen risiko juga penting setelah bencana alam agar upaya pemulihan, rehabilitasi, dan konstruksi dapat dilakukan secepatnya. Manajemen bencana dibangun melalui kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah mengenai permasalahan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana.

2.3.3 Kebijakan-kebijakan Terkait Bencana

Kebijakan yang terkait dengan bencana adalah sebagai berikut:

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Presiden No. 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

2.3.4 Pendidikan Mitigasi Bencana

Pendidikan mitigasi bencana adalah bentuk perubahan perilaku untuk meningkatkan tindakan perlindungan dengan menyajikan informasi tentang bahaya dan risiko yang ditimbulkannya. Definisi pendidikan mitigasi bencana lainnya adalah metode atau pendekatan dengan pemahaman konsep-konsep yang berkaitan dengan kebencanaan yang bertujuan untuk mengembangkan pengertian dan kesadaran yang diperlukan untuk melakukan adaptasi kehidupan di daerah rawan bencana (Pendidikan Kebencanaan).

Mitigasi bencana adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari kedua dalam suatu negara atau masyarakat (Permendagri No. 33 Tahun 2006).

Pendidikan kebencanaan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi dampak bencana, baik untuk anak-anak maupun masyarakat serta membiasakan diri untuk tanggap dan sigap terhadap penanggulangan bencana. Bentuk pendidikan mitigasi bencana bermacam-macam, ada yang berbasis masyarakat, pendidikan bencana untuk menuju masyarakat sadar bencana, serta kearifan lokal dalam menangani bencana. (Preston, 2012; Setyowati, 2007)

Sasaran pendidikan kebencanaan menurut *Resolution Belgrad International Conference on Environmental Education* adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran

Kesadaran bertujuan untuk membantu individu atau pun kelompok untuk memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan keseluruhan berikut permasalahan yang terkait.

2. Pengetahuan

Pengetahuan membantu individu atau kelompok sosial memiliki pemahaman terhadap lingkungan total, permasalahan yang terkait dan nyata, manusia yang memiliki peran dan tanggung jawab yang penting di dalamnya.

3. Sikap

Sikap membantu individu atau kelompok sosial memiliki nilai-nilai sosial, rasa kepedulian, yang kuat terhadap lingkungannya, serta motivasi untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengembangan lingkungan.

4. Keterampilan

Keterampilan membantu individu atau kelompok sosial mengevaluasi persyaratan-persyaratan lingkungan dengan program pendidikan dari segi ekologi, politik, ekonomi, sosial, estetika, dan pendidikan.

5. Peran

Peran membantu individu atau kelompok sosial untuk dapat mengembangkan rasa tanggung jawab, dan urgensi terhadap suatu permasalahan lingkungan sehingga dapat mengambil tindakan relevan untuk pemecahannya.

2.3.5 Tanah Longsor

Naryanto dkk 2019 menjelaskan bahwa tanah longsor adalah proses perpindahan massa batuan (tanah) akibat gaya berat (gravitasi). Longsor terjadi karena adanya gangguan kesetimbangan gaya yang bekerja pada lereng, yaitu gaya penahanan dan gaya peluncur. Gaya peluncur dipengaruhi oleh kandungan air, berat massa tanah itu sendiri berat beban bangunan. Ketidakseimbangan gaya tersebut diakibatkan adanya gaya dari luar lereng yang menyebabkan besarnya gaya peluncur pada suatu lereng menjadi lebih besar daripada gaya penahannya, sehingga menyebabkan massa tanah bergerak turun.

Tanah longsor terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material itu sendiri seperti kondisi geologi, kemiringan lereng, litologi, sesar dan kekar pada batuan. Faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan Bergeraknya material tersebut seperti curah hujan, gempa bumi, erosi kaki lereng dan aktivitas manusia (Naryanto, 2013; Naryanto, 2017).

Gerakan tanah dapat diidentifikasi melalui tanda-tanda sebagai berikut: munculnya retak tarik dan kerutan-kerutan di permukaan lereng, patahnya pipa dan tiang listrik, miringnya pepohonan, perkerasan jalan yang terletak pada timbunan mengalami ambles, rusaknya perlengkapan jalan seperti pagar pengaman dan saluran drainase, tertutupnya sambungan ekspansi pada pelat jembatan, hilangnya kelurusan dari fondasi bangunan, tembok bangunan

retakretak, dan dinding penahan tanah retak serta miring ke depan. Berikut Jenis-jenis tanah longsor sebagai berikut :

1. Longsor Translasi

Longsoran translasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau meng- gelombang landai.

2. Longsor Rotasi

Longsoran rotasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung.

3. Pergerakan Blok

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang Bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu.

4. Runtuhan Batu

Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain Bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah.

5. Rayapan Tanah

Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang Bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebab-kan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah.

6. Aliran Bahan Rombakan

Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah Bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunungapi. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak.

BAB III

PROFIL DESA

3.1 Latar Belakang

3.1.1 Sejarah Desa Cilampuyang

Pada tahun 1860 Desa Cilampuyang masih bersatu dengan Desa Sekarwangi dan Desa Sakawayana. Namun dimulai dari tahun 1860 hingga tahun 1914 bernama Desa Sakawayana yang terbagi menjadi empat periode kepemimpinan Kepala Desa. Pada tahun 1914 Desa Sakawayana berubah nama menjadi Desa Sekarwangi selama sembilan periode kepemimpinannya hingga tahun 1985. Selama periode tersebut, terdapat juga kepemimpinan periode hingga tahun 1985. Maka pada tahun 1985 Desa Sekarwangi dimekarkan menjadi tiga Desa sampai sekarang, yaitu Desa Sekarwangi, Desa Cilampuyang dan Desa Sakawayana.

Desa Cilampuyang dari mulai tahun 1985 hingga saat ini telah melalui beberapa periode Kepemimpinan Kepala Desa dan pernah dijabat oleh beberapa orang Pejabat Sementara (Pjs). Asal usul dan Legenda Desa Cilampuyang menurut beberapa narasumber merupakan nama sebuah lembah yang berada dikawasan pertanian yang pada zaman dahulu kala, pertanian tersebut dipenuhi oleh “Rumput Lempuyang” yang bisa dijadikan bahan ramuan obat. Asumsi lain berpendapat bahwa nama Cilampuyang diambil karena pada zaman dulunya merupakan kawasan perkebunan teh dan juga karet, sehingga banyak orang dari luar daerah berdatangan untuk mencari nafkah atau berusaha, sehingga dalam bahasa Sunda sendiri disebut “Panguyangan”.

3.1.2 Kondisi Gerografis Wilayah

Desa Cilampuyang dengan luas 1.470 Ha. Merupakan desa yang terletak di sebelah utara Ibu Kota Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Jarak ke Ibukota Kecamatan sekitar 8 km dari Kantor Desa. Pada saat ini Desa Cilampuyang membagi wilayah teritorialnya ke dalam 3 dusun 7 RW dan 32 RT. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Dusun I terletak di Pusat Desa Cilampuyang yang berbatasan dengan Desa Cilengkrang Kec. Wado Kab. Sumedang. Dusun I membawahi 3 RW yaitu RW. 01, RW. 02 dan RW. 07.

2. Dusun II yang terletak di Sebelah Barat Desa Cilampuyang yang berada ditengah-tengah wilayah Desa Cilampuyang antara wilayah Kadus I dan Kadus III 2 RW yaitu RW. 03 dan RW. 04
3. Dusun III yang terletak di bagian Selatan Desa Cilampuyang yang berbatasan langsung dengan desa Sekarwangi dan wilayahnya membawahi 2 RW yaitu RW. 05 dan RW. 06

Tabel 3.1 Pembagian Dusun 1,2,3

Dusun	RW	Kampung	RT
1	1	Cilampuyang	1,2,3,4
		Cinapeul	5
	2	Cilampuyang	1,2,3,4
		Cigorowong	5
	7	Caringin	1,2,3,4
2	3	Citimbir	1,2,4
		Kebun Sawo	3
		Erpah	5
	4	Babakan	1,2,3,4,5
3	5	Cibitung	1,2,3,4
	6	Cibitung	1,2,3
		Parigi	4

Sumber : Profil Desa Cilampuyang Tahun 2023

Desa Cilampuyang merupakan desa yang memiliki luas wilayah di Desa Cilampuyang seluas 1.470 Ha / M² dan berada di dataran tinggi dengan ketinggian 726 mdl dengan curah hujan 1.886 mm/th. Pada umumnya kondisi wilayah Desa Cilampuyang adalah berbukit-bukut. Penggunaan lahan di Desa Cilampuyang sebagian besar di dominasi lahan pertanian. Adapun beberapa kondisi geografis Desa Cilampuyang akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.2 kondisi geografis

No	Letak Wilayah	Keterangan
1	Kondisi geografis Desa Cilampuyang	1. Banyaknya curah hujan : 1.886 mm/th 2. Topografi : Dataran Tinggi 3. Suhu Udara Rata-rata : 23°C

Lanjutan tabel 3.2 Keadaan Geografis Masyarakat Desa Cilampuyang

No	Letak Wilayah	Keterangan
2	Batas batas wilayah Desa Cilampuyang	1. Sebelah Utara : Desa Cilengkrang Kec. Wado – Sumedang 2. Sebelah Timur : Desa Mekarsari Kec. Malangbong 3. Sebelah Selatan : Desa Sekarwangi Kec. 4. Sebelah Barat : Kec. BL Limbangan
3	Luas Lahan : 1.470 Ha / M ²	1. Lahan persawahan : 108 Ha / M ² . 2. Lahan lading/tegal : 915,778 Ha / M ² . 3. Lahan pemukiman : 33,992 Ha / M ² . 4. Lahan kuburan : 0,9 Ha / M ² . 5. lahan perkebunan rakyat : 84,98 Ha / M ² . 6. Lahan jalan : 30,5 Ha / M ² . 7. Industry : 45,5 Ha / M ² . 8. Lain-lain : 2.50 Ha / M ² .

Sumber : Profil Desa Cilampuyang

3.2 Komponen Khusus Dalam Masyarakat

3.2.1 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Cilampuyang sebanyak 7.170 orang yang Kondisi di analisis melalui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, serta jumlah penduduk berdasarkan umur ataupun tingkat pendidikan

Tabel : 3.3 Jumlah Penduduk dan Persentasi Pertumbuhan

No	Komponen khusus	Keterangan
1	Penduduk desa : 7.170 orang	Laki-laki : 3.580 orang Perempuan : 3.590 orang Jumlah KK : 2.165 KK
2	Persentase pertumbuhan tahun 2022 sebesar 2, 5 %	Kelahiran : 77 orang Pendatang : 37 orang Pindah : 113 orang Meninggal : 22 orang

Sumber : Profil Desa Cilampuyang

Selanjutnya sebagai gambaran umum mengenai kondisi pendidikan dan ekonomi penduduk Desa Cilampuyang disajikan dalam bentuk tabel menurut kelompok umur/tingkat pendidikan, tenaga kerja, hasil mata pencaharian, dan jumlah penduduk miskin sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Gambaran Umum Kondisi penduduk

No	Kategori	Keterangan	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	Usia 02-04 yang belum masuk TK	3663
		Usia 05-06 yang sedang TK	202
		Usia 07-18 yang sedang sekolah	954
		Usia 19-56 yang pernah sekolah	3.433
		Tamat SD/Sederajat	3.433
		Tamat SMP	2.571
		Tamat SMA	575
		Tamat D1 D3	17
		Tamat S1, S2, S3	26
JUMLAH			14.874
2	Tenaga Kerja	Usia 18-56	2.933
		Usia 18-56 tidak bekerja	2.120
		Usia 07-19 masih sekolah	928
		Usia 56 ke atas atas	169
JUMLAH			6.150
3	Jenis Mata Pencaharian	Petani	932
		Buruh tani	809
		Pegawai swasta/BUMN	57
		PNS	13
		Pengrajin Industri	1
		Pedagang	230
		Montir	9
		TBI/POLRI	4
		Usaha Kecil Menengah	94
		Dokter, Bidan, dan Perawat swasta	-
JUMLAH			2.149
4	Jumlah Penduduk Miskin	1023 KK	

Sumber : Profil Desa Cilampuyang

Berdasarkan gambaran umum tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat Desa Cilampuyang dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang tergolong kedalam usia sekolah mulai dari usia 05-18 dengan jumlah 1.156 yang masih bersekolah, sedangkan mayoritas masyarakat cilampuyang tingkat pendidikan terakhir adalah sampai SMP/SLTP 2.571

Tingkat perekonomian masyarakat Desa Cilampuyang yang dilihat dari kategori tenaga kerja mulai dari usia 18-58 tahun sebanyak 2.933 orang, sedangkan yang bekerja sebanyak 2.120 orang. Untuk masyarakat dalam usia 18-58 tahun yang tidak bekerja sebanyak 813 orang.

Tingkat perekonomian masyarakat Desa Cilampuyang yang dilihat dari kategori hasil mata pencaharian. Mata pencaharian mayoritas masyarakat masih didominasi oleh hasil pertanian sebanyak 932, sedangkan jumlah mata pencaharian tertinggi lainnya adalah buruh tani sebanyak 809, pedagang 230, dan peternak 230.

3.2.2 Sosial Ekonomi

Pendapatan penduduk Desa Cilampuyang dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat Desa Cilampuyang bermata pencaharian sebagai petani, peternakan, dan perdagangan. Serta ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri/swasta, pengrajin industri, montir, TNI/Polri, dan lainnya. Tingkat perkembangan perekonomian masyarakat Desa Cilampuyang sudah sedikit meningkat, hal ini bisa dilihat dari semakin menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya daya beli masyarakat. Ada beberapa bidang yang menjadi unggulan desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan merupakan potensi yang masih dapat digali dan dikembangkan yaitu dalam bidang pertanian dan bidang peternakan.

Berdasarkan hasil wawancara praktikan, rata-rata pendapatan masyarakat berkisar antara Rp. 800.000,- hingga Rp.1.000.000,- per bulan bagi petani dan/atau peternak. Sedangkan untuk pegawai swasta pendapatan mereka berkisar Rp. 2.117..318,- per bulan sesuai dengan UMR daerah Kabupaten Garut. Dari data tersebut praktikan menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan penduduk di Desa Cilampuyang beragam sesuai dengan pekerjaannya.

3.2.3 Kondisi Perumahan

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 2). Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Yang biasanya memiliki aturan dan kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut berada pada ketinggian 726 Mdl dengan kondisi wilayah desa yang pada umumnya berada di perbukitan. Untuk perumahan penduduk secara umum tersebar atau memiliki pola menyebar, dimana penduduk Desa Cilampuyang membangun rumah dekat dengan lokasi kebun atau lahan milik pertanian mereka. Kemudian, berdasarkan hasil *community night meeting* praktikan dengan kepala dusun bahwa 60% perumahan penduduk umumnya rumah panggung dan semua rumah telah memiliki *septic tank*. Lokasi perumahan penduduk yang berada di dataran tinggi sehingga terbebas dari banjir karena masih banyaknya daerah resapan air.

3.2.4 Struktur Kepemimpinan

Dalam menjalankan pemerintahan di suatu wilayah atau dalam hal ini desa tentunya tidak terlepas dari adanya struktur kepemimpinan dalam pelaksanaan pelayanannya terhadap masyarakat. Masing-masing posisi memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Cilampuyang. Dibawah ini merupakan struktur pemerintahan Desa Cilampuyang.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.2.5 Sistem Nilai Budaya

Penduduk Desa Cilampuyang dapat dikategorikan sebagai penduduk heterogen, karena penduduknya terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Sistem nilai budaya yang kental di Desa Cilampuyang masih dengan budaya Sunda, hal ini terlihat dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah bahasa Sunda. Demikian juga jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di kantor desa maupun di luar kantor, bahasa yang digunakan merupakan bahasa Sunda. Penerimaan penduduk Desa Cilampuyang terhadap pendatang sangat baik, hal ini terlihat ketika adanya kedatangan praktikan yang akan melaksanakan kegiatan praktikum komunitas di Desa Cilampuyang dimana praktikan diterima dengan sangat baik kehadirannya di lingkungan masyarakat desa dan tak jarang kita diberi makan dari salah satu masyarakat desa.

Masyarakat Desa Cilampuyang keseluruhan beragama Islam dan secara umum termasuk masyarakat semi pedesaan, karena kondisi lingkungan dan keadaan perumahan warga di Desa Cilampuyag dominan memiliki tempat tinggal (rumah) yang sudah tidak lagi seperti rumah-rumah di desa pada jaman dahulu misalnya rumah-rumah yang beralaskan tanah dan beratapkan daun. Meskipun demikian, kondisi nilai budaya masyarakat desa sebagai masyarakat Suku Sunda tidak tertinggal dibawa oleh perubahan zaman yang masih terlihat cukup baik. Hal tersebut terlihat pada tingkat patisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menyangkut keperluan bersama seperti contoh kegiatan gotong royong, pembangunan rutilahu, kerja bakti, kegiatan rutin di desa seperti kegiatan pengajian, dan lain sebagainya

hingga kegiatan ataupun acara-acara yang dibuat oleh salah satu warga dan warga yang lainnya pun turut serta membantu.

3.2.6 Sistem Pengelompokan dalam Masyarakat

Secara administratif , masyarakat Desa Cilampuyang dikelompokkan menjadi 3 dusun 7 RW dan 32 RT. Dusun I mencakup RW 01, RW 02, dan RW 07. Dusun II RW03 dan RW 04. Kemudian, untuk Dusun III mencakup RW 05 dan RW 06. Penduduk Desa Cilampuyang juga cenderung memiliki kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok kecil di Desa cikole terbentuk karena adanya kesamaan usia, jenis kelamin, hobi dan organisasi masyarakat.

Kelompok-kelompok kecil tersebut memberikan dampak yang baik terhadap anggota kelompoknya dan juga masyarakat Desa Cilampuyang. Beberapa kelompok tersebut antara lain kelompok pengajian, kelompok tani, kelompok ternak, dan kelompok lainnya

3.2.7 Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sistem pelayanan kesejahteraan sosial di Desa Cilampuyang secara formal di kelola terpusat di desa dan juga secara non-formal yang digerakkan di masyarakat. Pelayanan tersebut umumnya secara bebas dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa Cilampuyang. Pelayanan secara formal dikelola terpusat di desa misalnya adalah pengurusan surat-surat keterangan dari desa, pengadaan posyandu, pengadaan posbindu, pembinaan PKK, pendataan, pelaksanaan himbauan dan program baik dari pemerintah kabupaten/provinsi/pusat dan lainnya. Selanjutnya juga terdapat organisasi di desa misalnya adalah BPD, MUID, KOMPEPAR, BUMDes, Karang Taruna, dan yang lainnya.

Pelayanan kesejahteraan sosial yang digerakkan oleh masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan karena inisiatif di masyarakat. Misalnya adalah pengajian rutin di setiap dusun atau rw ataupun mengadakan kegiatan seperti rajaban atau kerja bakti. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik secara spiritual, psikologis maupun sosialnya.

Adapun kebijakan-kebijakan tentang programiprogram yang dilaksanakan di Desa Cilampuyang ialah sebagai berikut:

1. Gerakan Pangan Murah

Penyelenggaraan Gelar Pangan Murah (GPM) serempak. Acara ini berlangsung di Kantor Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah (PPPD) atau Samsat Kabupaten Garut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Garut, Haeruman, menjelaskan, GPM adalah kolaborasi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi (DKPP) Jawa Barat, bersama DKP Kabupaten Garut.

2. Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (LAPAD RUHAMA)

Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LAPAD RUHAMA adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat. LAPAD RUHAMA berdasar pada Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat.

3. KUBE WRSE

Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi melalui KUBE Ternak Ayam. Bimbingan Teknis dilaksanakan pada Bulan Juli dan Penyaluran pada Bulan Agustus. Monitoring dan Pengawasan dilaksanakan sekurang- kurangnya satu bulan sekali oleh unsur pada Bidang Pemberdayaan Sosial maupun pilar-pilar sosial. 2 Kelompok Usaha Bersama pada Desa Cilampuyang Malangbong

4. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Program ini digagas oleh Kemensos dengan maksud supaya membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

5. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau BST

Program Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi

disalurkan secara nontunai. Program bantuan sosial pangan yang sebelumnya merupakan Subsidi Rastra mulai ditransformasikan menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau melalui program BPNT dengan penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. BPNT disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di E-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

6. Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD)

Terdapat 3 jenis BLT yang berjalan saat ini, yaitu:

1) Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi

Kabupaten Garut meraih penghargaan dalam pengendalian inflasi dari pemerintah pusat. Bersama 29 kabupaten dan kota, Kabupaten Garut ditetapkan sebagai kabupaten terbaik di Indonesia dalam pengendalian inflasi daerah, terutama dalam penganggaran untuk belanja kemiskinan dan belanja pengendalian stunting. Pengelolaan Data dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai dasar penyaluran Bantuan oleh Dinas Sosial; Dinas Perhubungan; Dinas Perikanan dan Peternakan; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; KUBE Fakir Miskin Kabupaten; dan KUBE Fakir Miskin Provinsi.

2) Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Diperuntukan bagi Petani Tembakau dan Buruh Tembakau yang terdaftar DTKS. Besaran yang diberikan yaitu Rp 1.200.000,00.

3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pengelolaan Data Penerima oleh Desa dan diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2.8 Kemungkinan Menerima Perubahan

Berdasarkan hasil pengamatan praktikan dan wawancara yang dilakukan bersama pemerintah desa kemungkinan menerima perubahan bagi masyarakat Desa Cilampuyang dalam hal peningkatan pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari antusiasme perangkat Desa dalam penerimaan mahasiswa praktikan di desa mereka, selain itu sikap masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan intervensi menunjukkan bahwa mereka dapat menerima perubahan melalui praktikum komunitas yang ada di desanya.

3.3. kehidupan Interaksi Sosial Masyarakat

3.3.1 Kehidupan Kerja Sama

Kehidupan kerja sama masyarakat Desa Cilampuyang cukup terjalin dengan baik. Salah satu upaya untuk mempertahankan kebersamaan ini adalah melalui pelaksanaan pengajian secara berkala di setiap RW. Selain pengajian masyarakat Desa Cilampuyang juga sering mengadakan jumat bersih yang dilakukan satu bulan sekali. Berdasarkan hasil pengamatan dari praktikan salah satu bentuk kerja sama yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat Desa Cilampuyang adalah membangun rumah tidak kayak huni. Dalam pembangunan rutilahu ini masyarakat tidak hanya ikut serta dalam pengadaan dana saja namun masyarakat juga ikut serta dalam memberikan tenaganya untuk pembangunan rumah dan menyediakan makanan untuk keperluan bersama.

3.3.2 Komunikasi Antar Anggota Masyarakat

Komunikasi antar anggota masyarakat terjalin cukup baik hal ini dapat dilihat saat praktikan menjalankan kegiatan praktikum komunitas, para praktikan mereka merasakan kedekatan interaksi antar warga, hal ini dapat ditandai oleh keramahh tamahan warga dalam menerima praktikan dan menyambut naik saat praktikan akan melakukan wawancara terkait isu-isu yang diangkat. Namun komunikasi antar masyarakat masih menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa sunda. Hal ini sedikit menghambat praktikan dalam melakukan komunikasi bersama masyarakat dikarenakan dalam satu kelompok yang dapat berbahasa sunda hanya satu orang.

3.3.3 Keeratan Hubungan Antar Anggota Masyarakat

Keeratan hubungan antar anggota masyarakat Desa Cilampuyang terjalin sangat baik hal ini dapat dilihat dari sangat jarang terjadi konflik antar. Meskipun mereka sangat menerima perubahan yang dibawa oleh praktikan dapat disimpulkan masyarakat tetap sangat menjaga rasa kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini dilihat dari kegiatan rutin ibu-ibu bermain bola voli serta adanya ronda malam yang saat ini masih terjaga seperti direalisasikan oleh Dusun 1.

3.3.4 Konflik yang Pernah Terjadi di Masyarakat

Desa Cilampuyang jarang sekali terjadi konflik antar masyarakat, namun konflik ini juga pernah terjadi dalam waktu-waktu tertentu seperti saat musim kemarau dimana mayoritas masyarakat tidak dapat berkebun dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya hal inilah yang membuat terdapat oknum-oknum

yang melakukan kejahatan seperti pencurian. Konflik yang pernah terjadi dan sampai saat ini masih sering terjadi adalah pencurian hasil pertanian masyarakat seperti pisang, jagung, terong dan lain sebagainya. Selain itu konflik yang pernah terjadi di Desa Cilampuyang adalah pelecehan seksual di Dusun II Kampung Citimbir.

3.3.4 Cara Penyelesaian Konflik di Masyarakat

Penyelesaian konflik yang dilakukan untuk kejadian konflik yang pernah terjadi berupa penyelesaian secara kekeluargaan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka tindakan selanjutnya adalah tindakan hukum dengan menyerahkan pelaku ke pihak yang berwenang

3.4 Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Desa Cilampuyang.

Tabel 3.5 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Desa Cilampuyang

No	Jenis PSKS	Keaktifan
1	Pekerja sosial profesional	Tidak ada
2	Pekerja sosial masyarakat	Tidak ada
3	Taruna siaga bencana	Tidak ada
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Tidak ada
5	Karang taruna	Ada
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tidak ada
7	Keluarga pioneer	Tidak ada
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga (WKSBM)	Tidak ada
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Tidak ada
10	Penyuluh sosial	Ada
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Ada
12	Dunia usaha	Ada

Sumber : Profil Desa Cilampuyang

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Cilampuyang masih belum memiliki SDM yang mendukung untuk penyelesaian masalah sosial yang ada di Desa. SDM pendukung untuk penyelesaian masalah sosial ini adalah pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, LK3, keluarga

pioneer WKSB, LKS, dan wanita pemimpin kesejahteraan sosial. Namun di Desa Cilampuyang terdapat karang taruna, penyuluh sosial, TSKS, dan juga terdapat dunia usaha.

Desa Cilampuyang juga memiliki asset sumber komunitas desa, dimana sumber komunitas dibagi menjadi sumber manusia, sumber material, sumber non material, sumber finansial, dan sumber alamian, adapun tabel sumber komunitas yang ada di Desa Cilampuyang ialah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Sumber Komunitas di Desa Cilampuyang

No	Sumber	Keterangan
1	Sumber Manusiawi	1) BUMDES 2) Majelis Ulama Desa 3) Karang Taruna 4) LPMD 5) PKK Desa Cilampuyang 6) Gabungan Kelompok Tani 7) BPD 8) Puskesmas 9) Linmas 10) Kelompok pengelola sampah
2	Sumber-sumber material	1) Lembaga Pendidikan (SD-SMP) 2) Sarana Olahraga (Lapangan Bola) 3) Sarana Keagamaan (Masjid dan Mushola) 4) Balai Kampung 5) GOR Desa 6) Posyandu
3	Sumber Non-material	1) Pengajian mingguan dan bulanan 2) Paguyuban kelompok Voli 3) Marawis 4) Perayaan PHBI 5) Gotong Royong 6) Jumat bersih 7) Jumat berkah

Lanjutan tabel 3.6 Sumber di Desa Cilampuyang

No	Sumber	Keterangan
4	Sumber Finansial	1) Jimpitan 2) Swadaya Masyarakat 3) Iuran masyarakat ke setiap RT/RW 4) Iuran pengajian
5	Sumber Alamiah	1) Lahan pertanian 2) Lahan perkebunan 3) Lahan perternakan 4) Curug Parigi

Sumber : *Profil Desa Cilampuyang Tahun 2023*

Berdasarkan data sumber asset komunitas yang dimiliki oleh Desa Cilampuyang menunjukkan bahwa Desa Cilampuyang memiliki cukup banyak sumber komunitas yang dibagi kedalam beberapa kategori yaitu : sumber manusiawi, sumber material, sumber non material, sumber finansial, dan sumber alamiah. Sumber komunitas tersebut tentunya tersebar di beberapa kampung yang ada di Desa Cilampuyang.

3.5 Masalah Sosial Utama yang Tampak

3.5.1 Identifikasi Masalah Sosial Desa Cilampuyang

Identifikasi masalah sosial di Desa Cilampuyang praktikan diskusi yang menggunakan teknik *Methodology Participatory Assesment* (MPA). Teknik penggunaan MPA ini digunakan untuk tujuan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. selain itu teknik ini juga dapat menentukan prioritas masalah di Desa Cilampuyang. Dalam pelaksanaan MPA, praktikan mengundang aparat desa, kepala dusun, serta perwakilan setiap RW di Desa Cilampuyang untuk berpartisipasi aktif dalam pengidentifikasian dan menentukan prioritas masalah. Berikut ini merupakan hasil dari kegiatan MPA yang dilaksanakan, yaitu :

Tabel 3.7 Hasil Identifikasi Masalah

Ekonomi	1) Belum memiliki SDM yang mmumpini untuk mengolah hasil perkebunan dan pertanian 2) Tingkat pendapatan masyarakat dari pihak luar terkait peningkatan perekonomian masyarakat
---------	---

Lanjutan tabel 3.7 Hasil Identifikasi Masalah

Ekonomi	3) Kurang sosialisasi dari pihak luar terkait peningkatan perekonomian masyarakat 4) Masyarakat kurang kreatif dalam mengembangkan potensi untuk meningkatkan perekonomian 5) Masyarakat memberikan hasil tani kepada tengkulak dalam bentuk bahan baku 6) Belum adanya pelatihan di bidang ekonomi 7) Sulitnya memperoleh modal usaha
Sosial	1) Banyak masyarakat yang kerja keluar daerah 2) Individualism khususnya di kalangan pemuda 3) Kurang adanya pembinaan kepemudaan 4) Permasalahan stunting 5) Susahnya pengorganisasian masyarakat 6) Tidak adanya SDM yang kompeten dalam mengelola sampah 7) Kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi Desa 8) Pengelolaan bahan baku pertanian belum ada karena haya menjual bahan baku 9) Sulitnya menentukan target pasar untuk menjual hasil pertanian 10) Belum adanya pelatihan tentang kewirausahaan 11) Belum adanya kelompok UMKM di lingkungan di lingkungan Desa
Lingkungan	1) Tidak adanya TPA 2) Kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kurang optimal 3) Jalan yang kurang bagus sehingga moilitas distribusi hasil pertanian kurang optimal 4) Belum maksimal dalam pengelola sampah mandiri 5) Tidak adanya tim pengelola sampah organic

Lanjutan tabel 3.7 Hasil Identifikasi Masalah

Linkungan	6) Belum adanya tim pengelola sampah rumah tangga seperti bekas sayuran dan minyak jelantah 7) Belum adanya mekanisme pengelolaan kotoran ternak 8) Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat untuk menyadarkan terkait gotonng royong, keamanan, dan kebersihan
Bencana	1) Jalur air tersedot sampah sehingga menyebabkan air tergenang 2) Masih banyak tanah rawan longsor khussunya di daerah perkebunan 3) Kemarau panjang 4) Perlindungan mata air belum optimal

Sumber : MPA Praktikan Tahun 2023

Berdasarkan tabel dia atas permasalahan sosial dikelompokkan kedalam empat kategori yaitu : ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. berdasakrkan tabel di atas dapat disimpulkan permasalahan dari kategori sosial cukup banyak yaitu sebelas masalah sosial. Dan permasalahan yang paling sedikit dalam kategori bencana.

3.5.2 Upaya Mekanisme Pemecahan Masalah

Dari beberapa beberapa kategori permasalahan sosial yang telah diidentifikasi maka untuk mengatasi masalah-masalah sosial ini diperlukan adanya upaya penyelesaian dari empat kategori permasalahan di Desa Cilampuyang, penyelesaian masalah ini merupakan tanggung jawab Pemeintah, pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Cilampuyang. Berikut Upaya-uapya penyelesaian maslah dari setiap kategori sebagai berikut :

1. Ekonomi

Dalam penyelesaian masalah ekonomi di Desa Cilampuyang Pemerintah Desa telah berusaha untuk membantu perekonomian masyarakat dengan cara melakukan pendataan dengan cermat kepada warga yang memang memerlukan bantuan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, Desa Cilampuyang juga terdapat BUMDes yang merupakan lembaga milik desa yang tentunya dapat, memberikan permodalan bagi usaha-usaha yang ada di masyarakat Desa Cilampuyang.

2. Sosial

Desa Cilampuyang yang berusia produktif khususnya laki-laki bekerja di sektor swasta dan juga yang memilih bekerja di luar kota, hal ini mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia yang dapat menjalankan organisasi di Desa. Upaya penyelesaian masalah untuk kategori sosial Dalam hal ini aparat desa dan tokoh masyarakat tetap melakukan pendekatan ke masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di Desa.

3. Lingkungan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cilampuyang untuk saat ini ialah akan melakukan pemagaran agar sampah dibuang di lokasi pembuangan bukan di pinggir jalan lokasi pembuangan.

4. Bencana

Daerah Desa Cilampuyang merupakan daerah pegunungan yang tentunya rawan akan terjadinya tanah longsor. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa Cilampuyang telah mengalokasikan dana untuk kerugian tanah longsor dan pihak pemerintah Desa Cilampuyang

3.5.3 Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil observasi langsung praktikan yang dilakukan selama proses inisiasi sosial dan asesmen adapun hasil yang dicapai dari upaya penyelesaian permasalahan sosial tersut adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Bantuan dari pemerintah di Desa Cilampuyang sudah cukup tepat sasaran dapat dilihat dari masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan seperti rutilahu, Program Keluarga Harapan, dan Progran Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu bantuan yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan nantinya kegiatan perekonomian masyarakat Desa Cilampuyang dapat mengalami peningkatan.

2. Sosial

Setelah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait peluang-peluang usaha yang dapat dijadikan sebuah usaha di Desa Cilampuyang diharapkan nantinya pemuda pemudi Desa Cilampuyang dapat kembali ke desanya untuk memajukan usaha tersebut dan menjadi sumber daya

manusia yang lebih kompeten dalam memajukan organisasi yang di Desa Cilampuyang.

3. Lingkungan

setelah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan telah dilakukannya pelatihan pengolahan sampah, diharapkan bank sampah yang pernah ada di Desa Cilampuyang khususnya di kampung Caringin dapat beroperasi kembali dan memberikan pendapatan kepada masyarakat Desa Cilampuyang.

4. Bencana

Setelah adanya sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana tanah longsor diharapkan nantinya masyarakat Desa Cilampuyang dapat lebih berhati-hati dan memahami apa yang disampaikan, agar sebelum terjadinya bencana masyarakat Desa Cilampuyang dapat menyelamatkan diri dan meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan di masyarakat Desa Cilampuyang.

BAB IV

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

4.1 Inisiasi Sosial

4.1.1 Penerimaan Praktikan

Penerimaan seluruh mahasiswa praktikan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Garut, Kecamatan Malangbong, dan dilanjutkan penerimaan mahasiswa di kantor desa masing-masing praktikan. Penerimaan seluruh mahasiswa praktikan oleh Bupati Garut dilaksanakan di Pendopo Garut pada pukul 09.00 – 11.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Garut dan jajarannya, Kepala Dinas Sosial beserta jajarannya, Direktur Poltekesos bersama dosen prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dan para kepala desa serta pendamping lapangan dari desa lokasi praktikum komunitas. Dalam kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh Direktur Poltekesos Bandung, kemudian sambutan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, dan terakhir penerimaan dari Bupati Garut, serta diakhiri dengan foto bersama per kelompok bersama kepala desa dan pendamping lapangan.

Dalam sambutannya, Bupati Garut sangat menerima kedatangan praktikan dari Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang berjumlah 90 mahasiswa yang dibagi menjadi 14 kelompok di 14 desa Kecamatan Malangbong. Bupati berharap dengan adanya mahasiswa yang melakukan praktikum komunitas maka dapat belajar secara langsung mengenai bagaimana cara memecahkan permasalahan sosial di Kabupaten Garut khususnya di 14 Desa Kecamatan Malangbong. Setelah acara penerimaan di pendopo selesai, mahasiswa praktikan beserta dosen menuju ke desa masing-masing.

Keberangkatan menuju desa dijemput oleh pihak desa dan berangkat bersama dari kantor kecamatan. Praktikan kelompok 7 praktikum komunitas yang berlokasi di Desa Cilampuyag di jemput oleh kepala desa yaitu Bapak Agus Samsudin dengan menggunakan motor serta kendaraan pribadi praktikan. Perjalanan dari kecamatan ke kantor Desa Cilampuyang memakan waktu sekitar 30 menit. Sesampainya di kantor Desa praktikan dan dosen pembimbing disambut hangat pada ruang kepala desa untuk dilakukan penerimaan dan pengenalan bersama perangkat Desa Cilampuyang. Penerimaan mahasiswa

praktikan Kelompok 7 oleh Kepala Desa yaitu Bapak Agus Samsudin, Bapak Kasie Kesra yaitu Bapak Enjang, dan Kepala Dusun 1 Bapak Tata yang sekaligus menjadi pendamping lapangan praktikan. Dalam kegiatan ini diawali dengan pengenalan dari masing-masing praktikan serta penjelasan maksud dan tujuan praktikan melaksanakan praktikum komunitas di Desa Cilampuyang selama 40 hari. Selanjutnya pengenalan dari perangkat desa dan penerimaan dari perangkat desa yang mendukung adanya kegiatan praktikum komunitas di Desa Cilampuyang. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 14.00 - 15.00 WIB.

Setelah itu kami diantar oleh pendamping lapangan menuju tempat tinggal kami yaitu di rumah Pak Kepala Desa yang berada tidak jauh dari kantor desa yaitu sekitar 300 meter. Disana kami bertemu Bapak Kepala Desa dan Keluarga, kami izin untuk bertempat tinggal di rumah tersebut selama 40 hari dan telah disiapkan Kasur dan kamar untuk kami berenam. Setelah itu kami membereskan barang-barang kami di tempat tinggal kami. Hasil dari tahap penerimaan praktikan ini adalah Diterima oleh Bupati Garut, sehingga dapat melakukan praktikum komunitas secara resmi. serta mendapat dukungan dari pejabat daerah khususnya pejabat Kabupaten Garut. Diterima oleh Camat Malangbong, sehingga praktikan mendapatkan izin untuk melaksanakan praktikum di Kecamatan Malangbong dan dapat melaksanakan praktikum dengan aman dan nyaman. Diterima oleh kepala desa dan perangkat Desa Cilampuyang, memperoleh dukungan, mendapatkan izin dan memperoleh tempat tinggal selama praktikum komunitas berlangsung.

4.1.2 Kontak Awal

1. Proses Kontak Awal

Kontak awal dilakukan dengan tujuan untuk membangun komunikasi awal dan menjalin relasi bersama pihak desa dan masyarakat serta membangun kepercayaan dengan berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat. Mahasiswa praktikan di Desa Cilampuyang melakukan kontak awal dengan perangkat desa selain itu praktikan juga melakukan home visit yaitu mengunjungi rumah Bapak Kepala Desa, Ketua Dusun 1, Ketua RW 1 dimana tempat tinggal praktikan berada untuk pengenalan dan menyampaikan beberapa informasi mengenai praktikum komunitas. Selain itu praktikan juga menjalin komunikasi dengan perangkat desa dan

masyarakat yang dekat dengan tempat tinggal praktikan di Kampung Cilampuyang, Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong.

2. Hasil dari kontak awal

Praktikan dan masyarakat saling mengenali satu sama lain, penerimaan dari masyarakat dan tokoh masyarakat sehingga dapat memudahkan praktikan dalam menggali informasi yang berkaitan dengan permasalahan, potensi, dan sumber yang dimiliki masyarakat Desa Cilampuyang.

4.1.3 Pemetaan Sosial

1. Prose Pemetaan Awal

Setelah melakukan kontak awal, tahapan selanjutnya yang dilaksanakan oleh praktikan adalah melakukan pemetaan sosial yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait keadaan masyarakat Desa Cilampuyang.

2. Hasil Pemetaan Awal

4.1.4 Transec Walk

1. Proses *Transect Walk*

Transect Walk merupakan kegiatan yang dilakukan oleh praktikan dengan berjalan-jalan menelusuri wilayah Desa Cilampuyang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal dan memahami kondisi geografis dan situasi lingkungan sosial di Desa Cilampuyang. Adapun proses yang praktikan capai dalam tahapan ini adalah praktikan melakukan transect walk di lingkungan RW 1 yaitu wilayah praktikan tinggal. Kemudian bersama pendamping desa praktikan menelusuri RW 3. Kemudian setelah dari RW 3 praktikan dan pendamping desa menuju ke RW 7.

2. Hasil *Transect Walk*

Hasil dari *transect walk* yang dilakukan adalah praktikan memperoleh gambaran tentang keadaan geografis Desa Cilampuyang dan memperoleh gambaran situasi sosial masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak sapi, domba, dan ayam.

4.1.5 Community Involvement

1. Proses *Community Involvement*

Community Involvement yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan masyarakat. Upaya praktikan agar dapat melebur bersama masyarakat adalah dengan cara mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat

di Desa Cilampiyang. Community Involvement ini juga bertujuan untuk membangun relasi dengan masyarakat Desa Cilampuyang dengan lebih luas. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan praktikan bersama masyarakat Desa Cilampuyana adalah :

2. Hasil *Community Involvement*

1) Bermain voli bersama ibu-ibu

Hari ketiga praktikum komunitas yaitu hari jumat tanggal 3 November 2023 praktikan diajak oleh Ibu Kades untuk mengikuti kegiatan bermain voli bersama ibu-ibu.

2) Bermain Bulu Tangsis Bersama Perangkat Desa

Kegiatan bulu tangkis ini sering dilakukan oleh setiap warga cilampuyang dimana di kantor terdapat fasilitas gor bulu tangkis dan ruangan gym. Kegiatan ini juga digunakan oleh praktikan untuk memperkenalkan diri kepada para perangkat Desa dan masyarakat yang mengikuti bulu tangsis ini.

3) Mengikuti posyandu

Kegiatan pusyandu ini dilakukan pada tanggal 13, 14, 16, 20 dan 21 November 2023. Kegiatan posyandu ini dilakukan di 5 kampung yaitu kampung Cibitung, Caringin, Cilampuyang, Babakan, dan Citimbir. Pada kegiatan Posyandu ini praktikan memperoleh informasi terkait data anak-anak stunting dan berapa warga yang terkena TBC.

4) Pembagian Beras Bulog

Pembagian beras bulog ini dilakukan pada tanggal 6 November 2023 pada kegiatan ini beras bulog yang dibagikan sebanyak 900 beras yang diberikan kepada warga yang terdata sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Dari kegiatan pembagian Bulog ini praktikan memperoleh informasi gambaran isu masalah terkait bantuan sosial PKH dan BPNT.

4.2 Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial merupakan proses mengidentifikasi struktur pengelompokan sosial dan organisasi-organisasi sosial lokal, melibatkan aspek-aspek potensial untuk menggerakkan masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi. Pengorganisasian sosial adalah salah satu kegiatan yang

dilakukan untuk membangun relasi dengan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antar praktikan dengan masyarakat serta organisasi lokal dalam rangka penyiapan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan praktikum di Desa Cilampuyang.

1. Proses Pengorganisasian Sosial

Dalam kegiatan pengorganisasian sosial ini praktikan mengajak semua pihak-pihak yang terkait untuk membantu praktikan dalam mengangkat isu-isu permasalahan yang ada di Desa Cilampuyang. Praktikan juga mengajak organisasi lokal dan masyarakat untuk menyadari akan adanya masalah, kebutuhan, dan kekuatan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Proses pengorganisasian sosial yang dilaksanakan oleh praktikan di Desa Cilampuyang dilakukan selama 4 hari yaitu dari tanggal 5-8 November 2023. Pengorganisasian sosial yang dilakukan praktikan Desa Cilampuyang bersamaan dengan MPA awal yang dihari oleh kepala desa dan perwakilan organisasi lokal yaitu perwakilan dari PKK, perwakilan BumDes, Perwakilan BPD dan perwakilan RT/RW. Kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan mahasiswa praktikan kepada perwakilan-perwakilan yang telah diundang dan dilanjutkan dengan menjelaskan maksud tujuan pengorganisasian sosial dan MPA awal yaitu untuk mengenali setiap organisasi lokal yang ada di Desa Cilampuyang dan mengetahui permasalahan apa saja yang ada di Desa Cilampuyang, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meminta dukungan agar organisasi lokal yang ada dapat mendukung kegiatan praktikan selama berada di Desa Cilampuyang.

2. Hasil Pengorganisasian Sosial

Hasil dari pengorganisasian sosial ini adalah teridentifikasinya organisasi sosial lokal di Desa Cilampuyang, seperti PKK, BumDes, MUI, BPD, Karang Taruna, DKM, kelompok tani mandala wangi 1,2,3, kelompok perikanan, kampung KB, kelompok tani Tomarintis, kelompok tani Harapan Jaya, kelompok peternak lebah, serta tokoh masyarakat di Desa Cilampuyang sebagai potensi dalam penggerak partisipasi untuk peningkatan kesejahteraan sosial nantinya.

4.3 Asesmen

Asesmen adalah proses dalam praktik pekerjaan sosial, yaitu pemahaman dan pengungkapan masalah melalui kegiatan pengumpulan data,

penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh tentang permasalahan, kebutuhan, dan perubahan yang diperlukan oleh masyarakat. Pada tahap ini praktikan melakukan pengumpulan data, penganalisisan data, dan memprioritaskan masalah berdasarkan data yang diperoleh oleh praktikan tentang permasalahan, kebutuhan, dan perubahan yang diperlukan oleh masyarakat Desa Cilampuyang. Adapun tahapan asesmen dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap asesmen awal dan tahap asesmen lanjutan.

4.3.1 Asesmen Awal

1. Proses Asesmen Awal

Proses asesmen awal dilakukan pada hari jumat tanggal 3 November 2023 yang mengundang perwakilan dari RT/RW perwakilan dari organisasi-organisasi desa. Dalam proses asesmen awal praktikan menggunakan metode yang digunakan dalam intervensi yaitu *Methodology of Participatory Asesment (MPA)* teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan mengidentifikasi potensi sumber yang dimiliki oleh Desa Cilampuyang.

2. Hasil Asesmen Awak

Dari hasil asesmen awal yang menggunakan metode *Methodology of Participatory Asesment (MPA)* teridentifikasinya masalah sosial yang ada di Desa Cilampuyang. Penggunaan metode ini dilakukan bersama dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh RT/RW Perwakilan organisasi-organisasi yang ada di desa yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat itu sendiri dan menggali potensi sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian masalah. Berikut adalah identifikasi masalah sosial yang ada di Desa Cilampuyang :

Tabel 4.1 Permasalahan Sosial Desa Cilampuyang

No	Masalah	Prioritas Masalah
1	Strategi pemasaran produk kewirausahaan	1
2	Kurang taruna tidak aktif	6

Lanjutan tabel 4.1 Permaalahan di Desa Cilampuyang

No	Masalah	Prioritas Masalah
3	Ketergantungan pada bantuan sosial	2
4	Konsevasi sumber mata air	4
5	Manajemen organisasi kurang efektif	5
6	Kurang optimalnya peran pemuda	9
7	Pengolahan sampah di caringin	3
8	Mitigasi bencana di masyarakat	7
9	Tidak adanya TPA	10
10	Permodalan	8

Hasil dari asesmen awal yang menggunakan teknik Methodology Of Participatory Asesmen yang dilakukan bukan hanya mengidentifikasi permasalahan namun juga mengidentifikasi potensi sosial yang ada di Desa Cilampuyang. Berikut adalah potensi sosial yang dimiliki Desa Cilampuyang hasil Asesmen awal menggunakan teknik Methodology Of Participatory Asesmen. Berikut adalah identifikasi potensi sumber yang dimiliki desa Cilampuyang :

Tabel 4.2 Potensi Sumber Desa Cilampuyang

Potensi	Sumber
Pekerja masyarakat banyak sebagai petani dan peternak	Wisata curug
Memiliki organisasi masyarakat yang membantu pengolahan produk hasil pertanian seperti (jagung, terong, kopi dll	Pengolahan pupuk herbal
Kelompok pkk yang bisa diberdayakan	Adanya sumber air untuk penghijauan
Keompok karang taruna	Adanya perkebunan kopi
Organisasi kampung KB	Pengolahan biji kopi menjadi bubuk kopi murni yang bisa dijual
PT Pokhpan dan PT Agro	Hasil pertanian unggulan :

	jagung, terong, padi, cabai, dan kunyit
--	--

4.3.2 Asesmen Lanjutan

Asesmen lanjutan adalah proses penggalian informasi lebih mendalam lagi mengenai permasalahan yang telah diidentifikasi serta sudah diprioritaskan mengenai masalah yang akan ditindak lanjuti untuk dibentuknya sebuah solusi atau program. Praktikan mencari sebab – akibat dari munculnya masalah yang dipilih masyarakat dan menemukan kekuatan dan kelemahan pada sasaran target group dan interest group dalam mengatasi isu kurangnya pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana khususnya tanah longsor yang di fokuskan pada Kampung Cibitung, Cigorowong dan SMPN 3 Malangbong di Desa Cilampuyang. Selain itu praktikan juga menganalisis Potensi dan Sumber yang memiliki pengaruh yang dekat yang bisa digunakan dalam perencanaan intervensi dari masalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana khususnya tanah longsor tersebut serta mencari titik-titik rawan longsor dan kerugian apa saja dari bencana tanah longsor yang pernah terjadi.

Praktikan menganalisis salah satu prioritas permasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana khususnya tanah longsor yang pernah terjadi di Kampung Cibitung daerah parigi, Kampung Cigorowong dan SMPN 3 Malangbong, apa saja dampak-dampak yang disebabkan dari bencana yang terjadi dan bantuan apa saja yang telah diberikan oleh pihak desa dan dinas-dinas terkait. Kemudian analisis ini akan menjadi landasan rencana intervensi yang akan di ambil dari isu permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana khususnya tanah longsor. Teknik yang digunakan dalam melakukan asesmen lanjutan yaitu dengan diskusi informal, observasi dan menggunakan Analis Pohon Masalah untuk menemukan sebab-akibat dari permasalahan serta menggunakan teknik diagram ven yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing institusi dalam kehidupan masyarakat serta untuk mengetahui harapan-harapan apa dari masyarakat terhadap institusi tersebut. Dan terakhir membentuk Tim Kerja Masyarakat dengan membuat Janji Hati.

1. Proses Asesmen Lanjutan

Melakukan diskusi Informal dengan beberapa pihak seperti bapak kades, bapak kades, kepala sekolah dan siswa siswi SMPN 3 Malangbong. Praktikan melakukan penggalian informasi yang mendalam mengenai masalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana khususnya tanah longsor yang ada di Desa Cilampuyang. Asesmen lanjutan dilakukan dengan diskusi informal dan *community meeting* yang dilaksanakan di waktu yang berbeda kemudian Praktikan melakukan observasi langsung ke titik-titik terjadinya tanah longsor di Desa Cilampuyang dengan turun langsung untuk meninjau keadaan setelah terjadinya longsor di lokasi bencana. Setelah melakukan observasi langsung praktikan mengambil salah satu target pelaksanaan intervensi yang akan dilakukan di SMP 3 Malangbong dan target dari pelaksanaan intervensi adalah para siswa siswi yang bertempat tinggal di Desa Cilampuyang dan tenaga pendidik yang ada di SMPN 3 Malangbong. Dari asesmen lanjutan ini praktikan memperoleh sebab akibat dari masalah yang menjadi fokus masalah yang diambil oleh praktikan yaitu kurangnya pemahaman warga sekolah terkait mitigasi bencana khususnya tanah longsor dengan menggunakan metode Pohon Masalah, tujuan menggunakan analisis pohon masalah ini adalah mencari lebih lanjut atau pendalaman informasi dengan melibatkan warga sekolah untuk mengetahui sebab dari permasalahan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait mitigasi bencana yang ada di Desa Cilampuyang dan penyebab yang ditimbulkan dari permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana.



Gambar 4.1 Kegiatan Asesmen
Pohon Masalah

Pada tahap selanjutnya praktikan melakukan penganalisisan potensi dan sumber yang memiliki pengaruh baik dan dekat dengan permasalahan yang bisa

digunakan dalam pemecahan masalah kurangnya pemahaman siswa-siswi terkait mitigasi bencana di SMPN 3 Malangbong. Praktikan menggunakan Diagram Ven untuk menganalisis potensi dan sumber yang memiliki pengaruh baik dan dekat.



Gambar 4.2 Diagram Venn

Pada tahapan selanjutnya praktikan melakukan pembentukan Tim Kerja Masyarakat yang dilakukan dengan siswa-siswi di SMPN 3 Malangbong. Tim kerja ini akan bekerja sama dengan praktikan dalam melaksanakan program yang telah disepakati sebelumnya.

2. Hasil Asesmen Lanjutan

Hasil asesmen lanjutan dengan menggunakan Analis Pohon Masalah. Pohon masalah adalah teknik yang digunakan untuk untuk mengidentifikasi penyebab serta akibat dari fokus permasalahan yang diambil praktikan menunjukan bahwa penyebab dari sebagai berikut :



Gambar : 4.3 Pohon Masalah

Berdasarkan pohon masalah di atas yang telah mengundang siswa-siswi dan perwakilan guru di SMPN 3 Malangbong maka dapat dilihat bahwa isu

masalah yang di ambil terkait mitigasi bencana khususnya tanah longsor. Berikut akan dijelaskan sebab akibat dari fokus masalah yang diambil oleh praktikan :

1) Fokus Masalah

Pelaksanaan asesmen lanjutan yang dilakukan tahap awal yang dilakukan adalah menentukan fokus masalah. Dalam menentukan fokus masalah praktikan dan masyarakat bersama-sama menentukan fokus masalah yaitu kurangnya pemahaman siswa-siswi terkait mitigasi bencana di SMPN 3 Malangbong.

2) Penyebab Masalah

Penyebab masalah dari kurangnya pemahaman siswa-siswi terkait mitigasi bencana di SMPN 3 Malangbong adalah sebagai berikut :

- (1) Materi kebencanaan belum sepenuhnya menyatu dengan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat asesmen awal dengan kepala sekolah SMPN 3 Malangbong penyebabnya kurangnya pemahaman siswa-siswi terkait mitigasi bencana adalah materi kebencanaan belum sepenuhnya diterapkan dalam pembelajaran. Pentingnya materi kebencanaan ini diperlukan agar setiap siswa-siswi mengetahui apa saja yang harus dilakukan saat kejadian bencana hal ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi beberapa wilayah di Kecamatan Malangong dimana memiliki banyak potensi bencana.
- (2) Belum adanya perhatian dari pihak terkait. Berdasarkan hasil diskusi bersama siswa-siswi dan guru SMPN 3 Malangbong diketahui bahwa belum ada upaya dari pihak terkait seperti Taruna Siaga Bencan (TAGANA), pemerintah desa, maupun pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi di sekolah.
- (3) Kurangnya kesadaran siswa-siswi dan pihak sekolah terkait pentingnya mitigasi bencana. berdasarkan hasil diskusi dengan siswa-siswi dan guru diketahui bahwa penyebab dari kurangnya pemahaman siswa-siswi terkait mitigasi bencana adalah belum adanya kesadaran dari pihak sekolah dikarenakan beberapa siswa kurang berminat untuk memahami upaya mitigasi bencana.

3) Akibat Masalah

- (1) Belum adanya kesiapan siaga siswa-siswi saat terjadi bencana. Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa akibat dari fokus masalah ini adalah belum ada kesiapan siaga berakibat pada saat terjadi bencana upaya penanggulangan bencana mungkin tidak berjalan lancar, dan bantuan mungkin tidak sampai tepat waktu.
- (2) Siswa tidak mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Berdasarkan hasil diskusi diketahui kurangnya pemahaman siswa-siswi terkait mitigasi bencana mengakibatkan siswa-siswi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga bila terjadi bencana akan mengakibatkan risiko yang lebih tinggi dan berpengaruh kepada korban
- (3) Kerugian yang ditimbulkan dari bencana semakin tinggi. Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa akibat kurangnya pengetahuan siswa tentang mitigasi bencana menyebabkan kerugian yang dialami semakin tinggi karena saat terjadi bencana siswa tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana.

Hasil pelaksanaan asesmen lanjutan lainnya menggunakan teknik diagram venn yaitu mengetahui sistem sumber yang tersedia dan dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah yang menjadi fokus praktikan. Melalui diagram venn ini praktikan bersama masyarakat dapat mengidentifikasi hubungan antara berbagai pihak yang dapat terlibat dalam menyelesaikan masalah. Berikut hasil diagram venn.



Gambar 4.4 Diagram Venn

Gambar diagram venn di atas memiliki dua jenis lingkaran yang menandakan besar atau kecilnya sebuah lembaga atau organisasi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program. diagram venn memiliki dua jenis lingkaran sedang dan besar dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut memiliki pengaruh yang besar dalam penyelesaian masalah, namun untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dapat dilihat garis yang menghubungkan antara pihak target intervensi dan BPBD masih terputus yang menandakan bahwa hubungan yang terjadi tidak terlalu erat hal ini dikarenakan jarak yang jauh, belum adanya kerjasama yang terjalin, dan pihak sekolah lebih memprioritaskan kegiatan pendidikan dibandingkan kegiatan kebencanaan. Untuk perangkat desa sendiri memiliki pengaruh yang besar dan mudah dijangkau hal ini karena perangkat desa memiliki posisi sentral dalam struktur pemerintahan di tingkat lokal. Selain itu terdapat dua lingkaran besar lainnya yang memiliki jarak yang dekat dengan sasaran intervensi ini yaitu Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan SMPN 3 Malangbong hal ini dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program nantinya mengingat anggota OSIS umumnya memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah mereka juga siap terlibat secara aktif dalam program-program yang dapat meningkatkan kehidupan sekolah. Diagram venn dua sistem sumber lain yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan komite sekolah dimasukkan kedalam kategori dua lingkaran sedang yang menandakan sistem sumber dapat dimanfaatkan namun hubungan dan interaksi yang terjadi sering dan manfaat organisasi dan lembaga ini cukup besar.

4.4 Perumusan Rencana Intervensi (Perencanaan Sosial)

4.4.1 Dasar Pemikiran

Bryson, 2018 perumusan rencana intervensi pada dasarnya merupakan perencanaan strategi yang memasyarakatkan pengumpulan data dan informasi secara luas, eksplorasi alternatif pemecahan masalah, serta implikasi masa depan atas keputusan yang dibuat. Rencana intervensi sebaiknya memuat perencanaan strategi yang dapat memfasilitasi komunikasi, partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, serta membantu pembuatan keputusan secara tertib dalam pemecahan masalah.

Perencanaan intervensi ini praktikan dan masyarakat bersama-sama kembali meninjau isu yang telah dibahas dalam asesmen lanjutan untuk menentukan urgensi dan merencanakan sebuah rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. selanjutnya praktikan dan komunitas diajak untuk

merumuskan alternative penyelesaian masalah dengan memanfaatkan sistem sumber yang ada di dalam komunitas tersebut. Dalam perencanaan intervensi ini, praktikan meninjau kembali hasil asesmen dan menentukan prioritas isu sesuai kondisi di komunitas.

Asesmen awal yang dilakukan oleh praktikan pada tanggal 3 November 2023 praktikan menemukan salah satu isu masalah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait potensi-potensi bencana yang ada di Desa Cilampuyang. Setelah melakukan asesmen awal selanjutnya praktikan melakukan asesmen lanjutan dengan metode *Focus Group Discussion* FGD dengan kepala Desa Bapak Agus, bapak Kadus satu Bapak Tata, perwakilan RT/RW. Setelah melakukan asesmen lanjutan menggunakan metode *Focus Group Discussion* FGD praktikan memperoleh informasi terkait wilayah-wilayah rawan tanah longsor, berikut wilayah wilayah terjadinya tanah longsor ;

Tabel 4.2 wilayah terjadinya Tanah Longsor

No.	Wilayah Rawan Bencana	Tahun Terakhir Terjadi
1.	Cigorowong	2015
2.	Cibitung (daerah Parigi)	2018
3.	SMPN 3 Malangbong	2021

Sumber : Hasil Praktikum Komunitas Desa Cilampuyang, 2023

Mengacu pada peninjauan kembali hasil asesmen, disimpulkan bahwa masalah bencana yakni kurangnya pemahaman siswa-siswi terkait mitigasi bencana maka dari itu praktikan mengambil salah satu lokasi SMPN 3 Malangbong dengan sasaran siswa-siswi. Lokasi ini dianggap sesuai untuk penyelesaian masalah kurangnya pemahaman terkait mitigasi bencana hal ini dikarenakan sasaran yang diambil adalah siswa-siswi yang termasuk kedalam kelompok rentan dan harus dilindungi, kemudian mengingat saat ini sedang musim hujan dan wilayah SMPN 3 Malangbong juga merupakan wilayah rawan tanah longsor maka perlu adanya simulasi bencana yang ada di wilayah rawan tanah longsor, selain itu sasaran intervensi ini juga dianggap sesuai dikarenakan siswa-siswi mayoritas warga asli Desa Cilampuyang.

4.4.2 Nama Program

Program yang akan dilaksanakan di Desa Cilampuyang yaitu “Mitigasi Ancaman Bencana Longsor Melalui Sosialisasi dan Simulasi Kepada Siswa-

Siswi SMPN 3 Malangbong Di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ”

4.4.3 Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan Umum

Tujuan program ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Anak-anak SMPN 3 Malangbong dalam menghadapi bencana mengingat Desa Cilampuyang memiliki potensi-potensi bencana khususnya tanah longsor.

2. Tujuan Khusus

- 1) Memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMPN 3 Malangbong terkait mitigasi bencana
- 2) Meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam menghadapi situasi bencana
- 3) Mengedukasi siswa-siswi agar siap menghadapi bencana

4.4.4 Bentuk Kegiatan

Rencana intervensi dalam pelaksanaannya terdapat dua bentuk kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi terkait mitigasi bencana

Sosialisasi yang akan dilakukan di SMPN 3 Malangbong akan mengundang langsung pihak BPBD untuk memberikan materi terkait apa yang dimaksud bencana, apa saja potensi bencana yang ada di Kabupaten Malangbong, dan menjelaskan terkait peta evakuasi bencana.

2. Simulasi mitigasi bencana

Simulasi yang akan dilakukan di SMPN 3 Malangbong terkait mitigasi bencana, simulasi ini akan dilakukan setelah pemaparan materi kebencanaan yang disampaikan oleh pihak BPBD. Simulasi ini diikuti oleh seluruh siswa yang dimulai dari satu siswa membacakan narasi yang sudah dipersiapkan dari pihak BPBD, kemudian seluruh siswa mempraktikan bagaimana cara menyelamatkan diri apabila terjadi bencana.

4.4.5 Sisrem Partisipan

Sistem partisipatif dalam pelaksanaan “Mitigasi Ancaman Bencana Longsor Melalui Sosialisasi dan Simulasi Kepada Siswa-Siswi SMPN 3 Malangbong Di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ” sebagai berikut :

Tabel 4.2 Sistem Partisipan

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Inisiator System</i>	1. Praktikan 2. Kepala Sekolah SMPN 3 Malangbong
2.	<i>Chage Agent System</i>	1. Praktikan 2. Tim Kerja
3.	<i>Client System</i>	Siswa-siswi SMPN 3 Malangbong
4.	<i>Support System</i>	1. Perangkat Desa 2. SMPN 3 Malangbong 3. BPBD Kabupaten Garut 4. Tagana Kecamatan Malangbong 5. Dinas Sosial Kabupaten Garut
5.	<i>Controlling System</i>	Tim Kerja
6.	<i>Implementing System</i>	1. Masyarakat Desa Cilampuyang 2. Tim Kerja 3. SMPN 3 Malangbong
7.	<i>Target System</i>	Siswa-siswi SMPN 3 Malangbong
8.	<i>Action System</i>	Tim kerja dan praktikan

4..4.6 Strategi dan Teknik

Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program “Mitigasi Ancaman Bencana Longsor Melalui Sosialisasi dan Simulasi Kepada Siswa-Siswi SMPN 3 Malangbong Di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ” *sosial campaign*, *sosil campaign* merupakan kegiatan berkampanye yang dilakukan oleh seseorang dengan serangkaian tindakan untuk mengkomunikasikan pesan yang biasanya berisi tentang masalah-maslah sosial kemasyarakatan, kampanye sosial juga diartikan sebagai sebuah kampanye yang bersifat non komersial karena tujuannya adalah perubahan agar masyarakat menjadi lebih baik. Tujuan kampanye sosial biasanya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah sosial yang sedang terjadi.

Stategi kedua yang digunakan dalam program ini adalah kolaborasi, kolaborasi Secara etimologi, *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan

yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. O'Leary, 2010 dalam Modul 01 Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi mengemukakan kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan, ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun. Berdasarkan pengertian di atas strategi kolaborasi ini dipilih dikarenakan adanya kolaborasi yang dilakukan antara praktikan, tim kerja, Tagana Kabupaten Garut dan pihak BPBD Kabupaten Garut dalam pelaksanaan intervensi.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan intervensi ini adalah observasi langsung. Morris (1973: 906) dalam Hasanah Hasyim mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindera manusia.

4.4.7 Jadwal dan Langkah-Langkah

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Pra Pelaksanaan

1) Melakukan koordinasi

Koordinasi dilakukan oleh praktikan dan tim kerja menghubungi pihak-pihak yang nantinya dapat memberikan bantuan untuk kelancaran program kegiatan. Koordinasi secara terarah dengan menghubungi narasumber kegiatan dan Kepala Sekolah SMPN 3 Malangbong.

2) Mengurus perizinan dan undangan kegiatan

Perizinan serta pembuatan surat undangan dilakukan dengan berkoordinasi kepada sekolah, *interest Group*, dan *target group*

3) Menyiapkan logistik

Praktikan menyiapkan tempat dan logistic terlebih dahulu dengan menyusun peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan intervensi serta mencatat seluruh perlengkapan agar tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya program ini tersusun dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Persiapan perlengkapan	08.00 – 09.00	Praktikan
2.	Acara Pembukaan	09.00 – 09.10	Guru
3.	Edukasi tentang jenis-jenis bencana	09.10 – 09.55	Pemateri dari BPBD
4.	Edukasi tentang langkah-langkah mitigasi bencana	-	Pemateri dari BPBD
5.	Kuis Interaktif	09.55 – 10.15	Praktikan
6.	Simulasi mitigasi bencana	10.15 – 10.45	Pemateri dari Pihak BPBD
7.	Penutup	10.45 – 10.55	Praktikan
8.	Dokumentasi	10.55 – 11.00	Praktikan

4.4.8 Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Rencana Anggaran Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan program “Mitigasi Ancaman Bencana Longsor Melalui Sosialisasi dan Simulasi Kepada Siswa-Siswi SMPN 3 Malangbong Di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ”. Berikut rincian biaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	Rp 3.000	Rp 3.000
	Surat Undangan	5	Lembar	Rp 500	Rp 2.500
	Spanduk	1	Lembar	Rp 75.000	Rp 75.000
	Jumlah 1				Rp 80.000
2.	Transportasi				
	Tamu Undangan	2	Orang	Rp 75.000	Rp 150.000
	Jumlah				Rp 150.000

Lanjutan Tabel 4.4 Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Konsumsi				
	Snak panitia	10	Box	Rp 5.000	Rp 50.000
	Snack Tamu	2	Box	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah				Rp 60.000
	Jumlah Keseluruhan				Rp 290.000

4.4.9 Indikator Keberhasilan

Indicator keberhasilan dari program ini sebagai berikut :

1. Siswa-siswi dapat memahami apa saja yang dimaksud mitigasi bencana
2. Siswa-siswi memiliki kemampuan untuk menolong, diri sendiri dan keluarga dalam menghadapi situasi bencana
3. Siswa-siswi mampu menerapkan keterampilan dan kesiapsiagaan bencana

4.4.10 Analisis SWOT

Masrumi 2020 tentang Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru) menjelaskan analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi program/bisnis. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT ini merupakan salah satu stategi yang digunakan dalam sebuah program untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah program yang akan dilaksanakan.

Berikut analisis SWOT dari Program “Mitigasi Ancaman Bencana Longsor Melalui Sosialisasi dan Simulasi Kepada Siswa-Siswi SMPN 3 Malangbong Di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut “ sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Analisis SWOT

Faktor Internal	Stength : 1. Adanya dukungan dari pihak sekolah SMPN 3 Malangbong 2. SMPN 3 Malangbong terbuka menerima perubahan 3. Siswa-siswi SMPN 3 Malangbong memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi terhadap pelaksanaan program	Weakness : 1. Siswa-siswi SMPN 3 Malangbong belum memiliki pengetahuan tentang bencana dan mitigasi bencana
Fakrrt Eksternal		
Opportunities : 1. Adanya dukungan dari Pemerintah Desa Cilampuyang 2. Adanya dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 3. Adanya dukungan dari Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Garut	Strategi SO : 1. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Cilampuya, Badan Penanggulangan Bencana, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan Kepala sekolah SMPN 3 Malangbong	Strategi WO : 1. Mengedukasi siswa-siswi SMPN 3 Malangbong untuk dapat mengikuti kegiatan mitigasi dan simulasi bencana 2. Mengundang narasumber yang ahli dalam bidang mitigasi bencana
Theats : 1. Ketidak pedulian siswa-sisiwi pada kegiatan yang dilaksanakan	Strategi ST : 1. Menggunakan penyampaian komunikasi dua arah saat pemberian materi. 2. Memberikan materi yang singkat dan mudah dimegerti oleh siswa-siswi	Strategi WT : 1. Menggunakan perbaikan edukatif yang menarik bagi siswa-sisiwi sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik

4.5 Pelaksanaan Intervensi

4.5.1 Proses Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intrvensi dilaksanakan pada 28 November 2023 di aula SMPN 3 Malangbong Desa Cilampuyang yang dihadiri oleh 120 orang siswa-siswi. Sebelum pelaksanaan intervensi, praktikan melakukan koordinasi baik dengan Tim Kerja Masyarakat (TKM) maupun narasumber melalui grup Whatsapp yang telah dibuat sebelumnya. Praktikan melakukan konfirmasi terkait waktu pelaksanaan, keperluan perlengkapan, dan kesediaan ruangan kepada TKM. Praktikan juga melakukan konfirmasi waktu dan tempat pelaksanaan intervensi kepada narasumber yaitu Bapak Hartono dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

Dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan pertama adalah penyuluhan sosial terkait peningkatan kesadaran siswa-siswi dalam mitigasi bencana dan kegiatan kedua yaitu simulasi bencana. Dalam pelaksanaan intervensi ini praktikan dan tim kerja mengundang.



Gambar 4.6 Pelaksanaan Intervensi

Tabel 4.6 Proses Pelaksanaan Intervensi

No	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Persiapan perlengkapan	08.00 – 09.00	Praktikan
2.	Acara Pembukaan	09.00 – 09.10	Guru
3.	Edukasi tentang jenis-jenis bencana	09.10 – 09.55	Pemateri dari BPBD
4.	Edukasi tentang langkah-langkah mitigasi bencana	-	Pemateri dari BPBD
5.	Kuis Interaktif	09.55 – 10.15	Praktikan

Lanjutan Tabel 4.6 Proses Pelaksanaan Intervensi

No	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
6.	Simulasi mitigasi bencana	10.15 – 10.45	Pemateri dari Pihak BPBD
7.	Penutup	10.45 – 10.55	Praktikan
8.	Dokumentasi	10.55 – 11.00	Praktikan

4.5.2 Hasil Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi adalah kegiatan praktikan dalam melaksanakan semua rencana kegiatan atau rencana itervensi yang telah disusun dan direncanakan sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan narasumber yang diundang memberikan materi terkait kebencanaan seperti pengertian bencana, jenis-jenis bencana, apa saja yang dilakukan saat kejadian bencana, dan apa saja isi dari tas siaga bencana. selain pemaparan materi untuk meriview materi yang diberikan oleh narasumber, narasumber juga mengadakan kuis berhadiah. Kegiata sosialisasi dan simulasi bencana yang akan dilakukan melalui program “Mitigasi Ancaman Bencana Longsor Melalui Sosialisasi dan Simulasi Kepada Siswa-Siswi SMPN 3 Malangbong Di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ” dihadiri oleh sisiwa-siswi sebanyak 120 orang peserta. Adapun hasilnya antara lain :

1. Siswa-siswi SMPN 3 Malangbong memahami potensi bencana yang ada di sekitar mereka.
Kegiatan intervensi yang telah dilakukan memberikan dampak yang baik kepada siswa-siswi SMPN 3 Malangbong. Dalam kegiatan ini siswa-siswi dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh narasumber. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kuis yang diberikan oleh praktikan dan narasumber siswa-siswi dengan antusias menjawab pertanyaan. Selain itu dalam kegiatan simulasi siswa-siswi juga dapat menyimak dan serius dalam mempraktikkan simulasi yang dipandu oleh narasumber.
2. Terjalannya hubungan baik antara pihak sekolah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut.

Dari adanya kegiatan ini hasil yang didapat adalah terjalinnya hubungan baik antara pihak sekolah dan pihak BPBD. Hal ini dapat dijadikan kesempatan bagi pihak sekolah untuk berkoordinasi jika ingin mengadakan kegiatan-kegiatan kebencanaan lainnya.

4.6 Evaluasi

Ulya Rahma (2015) menjelaskan proses evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam sebuah program atau pada klien. Tahap evaluasi itu sendiri merupakan suatu tahap untuk menilai atau melihat sampai seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Untuk melakukan evaluasi, pekerja sosial perlu mengkaji tujuan yang ditentukan beserta indikator pencapaiannya. Dari indikator tersebut pekerja sosial dapat menyusun beberapa instrument evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan terus menerus selama proses perubahan berencana berlangsung.

4.6.1 Evaluasi Proses

Evaluasi dari kegiatan “Mitigasi Ancaman Bencana Longsor Melalui Sosialisasi dan Simulasi Kepada Siswa-Siswi SMPN 3 Malangbong Di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ” dilakukan pada hari Selasa 28 sampai 30 November 2023 yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini dianggap cukup efektif dikarenakan untuk melakukan pertemuan lagi dengan siswa-siswi dan guru cukup memakan waktu dan ditakutkan mengganggu aktifitas belajar mengajar di sekolah. Penyebarluasan kuesioner dilakukan pada tanggal 28 sampai 30 November 2023 kepada anggota TKM dan Guru SMPN Malangbong grup What Up TKM. Bentuk kuesioner yang disebarkan berbentuk pernyataan yang diberikan angka mulai dari satu sampai empat dimana untuk jawaban satu tidak setuju dan tertinggi angka empat untuk jawaban sangat setuju.

4.6.2 Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Intervensi dilaksanakan melalui program “Edukasi Bencana Melalui Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Kepada Siswa SMPN 3 Malangbong, Desa Cilampuyang, Kabupaten Garut” dihadiri oleh

120 orang siswa-siswi. Program ini memiliki dua kegiatan yaitu Sosialisasi dan Simulasi bencana. Evaluasi ini dilakukan pada tanggal 28 sampai 30 November. Hasil yang didapat setelah evaluasi program menggunakan kuesioner hasil responden yang menjawab kuesioner sebanyak 30 orang, yang di dominasi oleh siswa-siswi dari kelas VII, VIII,dan IX dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa-siswi dan guru mengisi keenam indikator keberhasilan dengan angka empat yang menandakan bahwa kedua kegiatan yang dilakukan sukses. Berikut adalah tabel hasil kuesiner yang mewakili hasil keberhasilan pelaksanaan program :

Tabel 4. 7 Keberhasilan Program

indicator 1 Pemahaman siswa-siswi terkait pemaparan materi		Indikator 2 kesesuaian materi	
skor 3	Persentase	skor 3	Persentase
11 orang	35,48 %	8 orang	25 %
skor 4		skor 4	
20 orang	66,6 %	20 orang	66,6 %

indicator 3 partisipasi siswa-siswi dalam pelaksanaan program	
skor 3	Persentase
14 orang	45, 161 %
skor 4	
16 orang	51,612 %

Kesimpulan dari tabel di atas bahwa berdasarkan tiga indicator yang mewakili keberhasilan program, partisipan yang telah mengisi kuesioner menunjukkan bahwa dari ketiga indicator pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil dilaksanakan yang hal ini ditandai dari masyarakat mengisi kuesioner memberikan angka 3-4.

4.7 Terminasi dan Rujukan

4.7.1 Terminasi

Ulya Rahma (2015) terminasi merupakan indicator kapan akibat suatu kegiatan bergerak kepada hal-hal yang diinginkan sehingga secara langsung memperkuat atau menegaskan validitas keaslian assessment, pendefesian masalah, tujuan : penyelesaian model intervensi, dan kontrak. Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, ketika

kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, ketika permintaan-permintaan klien berhenti. Terminasi juga merupakan pintu masuk bagi kontak selanjutnya yang akan datang. Terminasi yang dilaksanakan pada tahap akhir pelaksanaan praktikum yaitu tanggal 07 Desember 2023 di Aula Kantor Desa Cilampuyang bersama dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan Perwakilan RT/RW. Kegiatan yang dilakukan praktikan pada saat terminasi antara lain :

1. Menyampaikan hasil laporan mulai dari isu masalah yang diambil oleh setiap praktikan dan rencana intervensi yang telah dilaksanakan selama melakukan praktikum komunitas di Desa Cilampuyang
2. Menanyakan pendapat, kritik, dan saran untuk program intervensi yang diambil oleh praktikan
3. Menyerahkan cendramata berupa plakat sebagai symbol bahwa telah selesainya praktikum komunitas di Desa Cilampuyang kepada Kepala Desa Cilampuyang, dan berpamitan dengan pihak-pihak terkait dan melakukan foto bersama.

4.7.2 Rujukan

Rujukan bertujuan untuk memberikan saran kepada pihak-pihak terkait agar program yang sudah dibentuk dan dilaksanakan bisa terus berjalan berikut hasil rujukan praktikum kepada pihak SMPN 3 Malangbong yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Kegiatan	Tujuan	Penanggung Jawab	Waktu	Output
1	Sosialisasi dan simulasi bencana setiap ajaran baru	Meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMPN 3 Malangbong terkait potensi bencana di sekitar mereka	Ketua TKM	1 tahun pembe lajaran	Adanya peningkatan pengetahuan siswa-siswi terkait materi kebencanaan

Lanjutan tabel 4.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Kegiatan	Tujuan	Penanggung Jawab	Waktu	Output
2	Memasukkan materi kebencanaan dalam salah satu kegiatan ekstra kulikuler	Agar setiap siswa-siswi memperoleh pengetahuan lebih luas terkait materi kebencanaan	Ketua TKM	1 tahun pembelajaran	Terbentuknya silabus kebencanaan dalam ekstra kulikuler
3	Penanaman pohon	Mencegah longsornya tanah di area sekolah	Ketua TKM	Per 3 tahun	Adanya pohon yang dapat mencegah terjadinya longsor di area sekolah

1. SMPN 3 Malangbong dapat mengawasi kegiatan yang dilakukan terkait edukasi kebencanaan dan memasukkan materi kebencanaan dalam salah satu kegiatan ekstra kulikuler. Pengawasan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait.
2. Melakukan sosialisasi dan simulasi setiap tahunnya agar setiap siswa baru memiliki pengetahuan terkait kebencanaan. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari koordinasi dengan pihak terkait, berkoordinasi terkait tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan, kemudian langkah akhir yaitu mengirimkan surat undangan untuk permohonan narasumber.
3. SMPN 3 Malangbong juga dapat melakukan upaya pencegahan bencana tanah longsor dengan penanaman pohon di sekitaran area sekolah.

BAB V

REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM

5.1 Penilaian Pelaksanaan Praktikum

Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang dilakukan pada 31 Oktober sampai 11 Desember 2023 dilaksanakan di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Berikut faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan praktikum komunitas :

5.1.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Peakrikum Komunitas di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut yaitu :

1. Penerimaan oleh pihak Desa Cilampuyang, serta seluruh warga Desa Cilampuyang yang sangat menerima praktikan
2. Kemungkinan menerima perubahan cukup tinggi
3. Partisipasi dari setiap organisasi Desa dan berperan aktif dalam pelaksanaan program dari setiap praktikan
4. Potensi sumber Desa Cilampuyang yang memadai
5. Dosen pembimbing yang sangat suportif dan sangat membimbing praktikan jika ada kendala dalam proses pelaksanaan praktikum
6. Kelompok yang kompak dan saling bekerjasama dalam setiap proses pelaksanaan praktikum mulai dari inisiasi sosial, sampai pelaksanaan intervensi
7. Adanya pedoman praktikum yang sangat membantu praktikan dalam melaksanakan langkah-langkah sejak awal hingga akhir yang berisi penjelasan, metode yang digunakan, teknik, taktik, strategi, dan sistematika penulisan laporan praktikum komunitas.

5.1.2 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil praktikum komunitas yang telah dilaksanakan di Desa Cilampuyang terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain :

1. Sulitnya mengumpulkan warga untuk melakukan pertemuan hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan praktikum komunitas sedang memasuki musim hujan dimana para masyarakat sibuk kekebun untuk menanam tanaman seperti jagung, terong, cabai dan lain-lain

2. Cuaca yang kurang mendukung dimana saat pelaksanaan praktikum komunitas sedang memasuki musim penghujan yang menyebabkan gagalnya rencana intervensi yang telah dijadwalkan sebelumnya harus dibatalkan dikarenakan hujan
3. Transportasi yang kurang memadai untuk melakukan kegiatan secara berkelompok.

5.2 Usulan dan Masukan Praktikan Pekerja Sosial Makro

Pelaksanaan praktikum komunitas yang dilaksanakan selama 40 hari memerlukan beberapa usulan atau masukan. Berdasarkan pengalaman praktikan di lapangan terdapat beberapa usulan agar praktikum komunitas menjadi lebih baik yaitu sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan praktikum diperpanjang agar kegiatan dalam rencana intervensi yang dilaksanakan lebih beragam dan lebih bervariasi. Selain itu perpanjangan waktu ini juga berguna untuk melakukan evaluasi secara tepat dan sesuai dengan ketentuan.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait agar memudahkan praktikan dalam mengundang narasumber dari dinas-dinas terkait.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak desa terkait kendaraan desa yang dapat digunakan untuk memudahkan mobilitas praktikan di Desa.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Praktikum Komunitas merupakan praktikum akhir yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi semester tujuh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dalam praktikum ke tiga mahasiswa dan mahasiswi prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial ditempatkan di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. praktikum ini dilaksanakan dalam 40 hari dan dibagi dalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, dan asesmen. Untuk lebih jelasnya tahapan praktikum akan dijelaskan di bawah ini :

1. Tahap inisiasi sosial, dalam pelaksanaannya praktikan melakukan kontak awal dengan pemerintah Desa dan masyarakat setempat selain itu dalam inisiasi sosial juga bertujuan untuk mengetahui kondisi geografis desa dimana praktikan ditempatkan dengan menggunakan teknik *transeck walk* ., Dari proses inisiasi sosial ini diperoleh peta hasil *transeck walk*
2. Tahap kedua yaitu pengorganisasian sosial, dalam pelaksanaannya praktikan menggubakan teknologi pekerja sosial yaitu *Methodology Participatory Assesment (MPA)* untuk mengidentifikasi apa saja organisasi yang ada di Desa Cilampuyang dan mengetahui karakteristik masyarakat. Dari tahap kedua praktikan memperoleh informasi terkait organisasi yang ada di Desa Cilampuyang, gambaran isu masalah yang ada di Desa Cilampuyang.
3. Tahap ketiga yaitu asesmen, dalam pelaksanaannya praktikan mulai melakukan asesmen lanjutan terkait isu masalah yang sudah didapatkan pada tahap kedua. Dari tahap ketiga ini praktikan mengambil salah satu isu masalah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait potensi bencana tanah longsor di Desa Cilampuyang. Setelah melakukan asesmen lanjutan praktikan menentukan sasaran untuk pelaksanaan program yaitu MPN 3 Malangbong. Intervensi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan simulasi bencana yang mengundang narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi diberikan kepada pemerintah Desa Cilampuyang dan SMPN 3 Malangbong.

1. Pemerintah Desa Cilampuyang
 - 1) Memperluas kerjasama antar instansi pemerintah maupun swasta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bencana dan potensi-potensi bencana.
 - 2) Mengadakan pelatihan mitigasi bencana bagi masyarakat dan anak-anak
2. SMPN 3 Malangbong
 - 1) Lebih sering mengadakan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana yang megedukasi seperti simulasi bencana dengan mengundang narasumber dari luar
 - 2) Memasang tanda-tanda jalur evakuasi di lingkungan SMPN 3 Malangbong

DAFTAR PUSTAKA

- Ami Maryami dkk. 2021. Peran Pekerja Sosial Dalam Penangkatan Anak Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "PARAMITA" Mataran Provisi Nusa Tenggara Barat <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/download/460/341#:~:text=Menurut%20Zastrow%20dalam%20Isbandi%20Rukminto,terentu%2C%20sesuai%20dengan%20yang%20ditangani>. Diakses pada 26 November 2023
- Etienne Wager. 2002. Cultivating Communities of Practice. Harvard Business School Press. https://www.researchgate.net/publication/265678077_Seven_Principles_for_Cultivating_Communities_of_Practice. Diakses pada 25 November 2023
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf> Diakses pada 25 November 2023
- Ulya Rahma. 2015. Evaluasi Terminasi dalam Pekerja Sosial. <http://demak58.blogspot.com/2015/06/evaluasi-dan-terminasi.html>. Diakses pada 11 Desember 2023
- Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, M.A. Konsep-Konsep Dasar Pemerintah Daerah. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf>. Diakses pada 23 November 2023
- Naryanto dkk 2019 . Analisis Penyebab Kejadian dan Evaluasi Bencana Tanah Longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Tanggal 1 April 2017".

Soejono Soekanto (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.

Edi Suharto. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama.

Soerjono Soekanto (2003). buku Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta, Terbitan: Raja Grando.

Netting, Ellen F. Peter M. Kettner, Steven L. McMurtry, 2004. Social Work Macro Practice, Pearson Education, Inc.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden No. 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Profil Desa Cilampuyang. 2022

Pedoman Praktikum Komunitas. 2023

Lampiran 1 Hasil Peta Transeck Walk



DAFTAR HADIR MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
DESA CILAMPUYANG, KECAMATAN MALAMBONG KABUPATEN GARUT

No	Nama Lengkap	NRP	Ok	November																														
			31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Vira Eliza	20.03.017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Siti Fatimah Z.R	20.03.081	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Ratih Desti S.	20.03.049	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
4	Lidia Agnes	20.03.063	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
5	Rana Fairus A.	20.03.065	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
6	Krisna Adi P.	20.03.058	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

Mengetahui,
Pendamping Lapangan Praktikum


Agus Samsudin

DAFTAR HADIR MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
DESA CILAMPUYANG, KECAMATAN MALAMBONG KABUPATEN GARUT

No	Nama Lengkap	NRP	Desember								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Vira Eliza	20.03.017	U	U	U	U	U	U	U	U	U
2	Siti Fatimah Z.R	20.03.081	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Ratih Desti S.	20.03.049	R	R	R	R	R	R	R	R	R
4	Lidia Agnes Clarita	20.03.063	a	a	a	a	a	a	a	a	a
5	Rana Fairus A.	20.03.065	R	R	R	R	R	R	R	R	R
6	Krisna Adi P.	20.03.058	K	K	K	K	K	K	K	K	K

Mengetahui,
Pendamping Lapangan Praktikum


Agus Samsudin

Lampiran 4 Berita Acara Pelaksanaan Intervensi Mitigasi dan Simulasi Bencana



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITERNIK KEMAJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 347 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2101330
Faks 022-2502962, website www.politerkon.ac.id, e-mail humas@politerkon.ac.id

BERITA ACARA
PELAKSANAAN INTERVENSI PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM MITIGASI BENCANA LONGSOR MELALUI SOSIALISASI TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA KEPADA SISWA-SISWI SMPN 3 MALANGBONG
DI DESA CILAMPUYANG, KECAMATAN MALANGBONG, KABUPATEN GARUT

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan Program Mitigasi Bencana Longsor Melalui Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Siswa-Siswi SMPN 3 Malangbong di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut:

1. Kegiatan : Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Tarapin Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2. Lokasi : Aula SMPN 3 Malangbong
3. Agenda : Program Mitigasi Bencana Longsor Melalui Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Siswa-Siswi SMPN 3 Malangbong di Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut
4. Jumlah : 120 Orang

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengertahi,



Kepala Sekolah
SMPN 3 Malangbong
Drs. H. H. H. H.



Kepala Sekolah
SMPN 3 Malangbong
Drs. H. H. H. H.

Lampiran 5 Hasil Kuesioner Evaluasi





